

BHUMI PURA

CITA CITRA GERBANG NEGARA



Kementerian Imigrasi
dan Pemasyarakatan
Direktorat Jenderal Imigrasi

Edisi 01

Volume 12/Februari 2025
www.imigrasi.go.id/majalah
Majalah Media Keimigrasian



MENGABDI, MELAYANI, & BERINOVASI

Tak hanya memperkuat pijakan di garis batas, berbagai program dan inisiatif dikerahkan Imigrasi Indonesia untuk memperluas jangkauan pelayanan yang berdampak dan dekat dengan masyarakat.



ISSN 3025-5333
9 773025 533006



TARIF PASPOR SESUAI KEBUTUHANMU



Penyesuaian Tarif Paspor

Berdasarkan PP No. 45 Tahun 2024 yang mengatur masa berlaku paspor 5 tahun dan 10 tahun

- | | |
|---|------------------|
| 1. Paspor biasa nonelektronik masa berlaku paling lama 5 tahun | Rp350.000 |
| 2. Paspor biasa nonelektronik masa berlaku paling lama 10 tahun | Rp650.000 |
| 3. Paspor biasa elektronik masa berlaku paling lama 5 tahun | Rp650.000 |
| 4. Paspor biasa elektronik masa berlaku paling lama 10 tahun | Rp950.000 |

“ Kami menyesuaikan tarif paspor berdasarkan jenis dan masa berlaku paspor sehingga masyarakat bisa memilih mana yang lebih sesuai dengan kebutuhannya. Kami pastikan penyesuaian tarif ini tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat dan mengimbangnya dengan peningkatan layanan publik yang berkelanjutan.

- **Saffar M. Godam, Plt. Direktur Jenderal Imigrasi**





KOMITMEN IMIGRASI UNTUK INDONESIA

Hari Bhakti Imigrasi ke-75 diperingati secara sederhana, tetapi tetap bermakna. Ini adalah cerminan bahwa di tengah perubahan zaman sekarang, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi tetap solid dalam komitmennya untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia.

Pada edisi perdana tahun 2025, redaksi *BhumiPura* menghadirkan wawancara dengan Direktur Kepatuhan Internal dan Direktur Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Dua direktorat baru ini diharapkan membawa semangat baru serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi imigrasi.

Upaya peningkatan pelayanan publik dilakukan melalui berbagai inovasi. Beberapa di antaranya adalah fasilitas *autogate* di Bandara Internasional Juanda serta Immigration Lounge di Ciputra World Surabaya dan Pesona Square Mall Depok. Di Blora, Imigrasi Pati hadir di Mall Pelayanan Publik sehingga masyarakat dapat mengakses layanan keimigrasian dengan lebih mudah.

Tidak hanya pelayanan, Imigrasi juga aktif melakukan penegakan hukum keimigrasian. Menteri Imigrasi mencatat adanya peningkatan penegakan hukum terhadap orang asing hingga dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Imigrasi berhasil mengamankan warga negara Amerika Serikat yang merupakan buronan U.S. Marshals serta mendeportasi tiga warga negara asing karena melanggar hukum keimigrasian.

Pada edisi ini, kami juga menyajikan berbagai diskusi menarik mengenai isu keimigrasian melalui rubrik *Opini* dengan artikel bertajuk "Direktorat Tempat Pemeriksaan Imigrasi: Harapan untuk Optimalisasi TPI" dan "Ancaman *Face Morph*: Tantangan untuk Keamanan Perbatasan dan Imigrasi". Tidak hanya itu, pembaca akan kami ajak menemukan keseimbangan di dunia digital dengan menyimak artikel mengenai FOMO vs. JOMO pada rubrik *Pojokomunikasi*.

Tidak sabar untuk terus membalik halaman dan lanjut membaca? Akhir kata, kami ucapkan selamat menikmati *BhumiPura* edisi 1 tahun 2025, Sahabat Mido!



cerita sampul

Menginjak usia 75 tahun, Direktorat Jenderal Imigrasi terus berkomitmen melayani, mengabdikan, dan berinovasi. Setiap petugas adalah garda terdepan yang senantiasa berjuang, memberikan pelayanan terbaik, dan mencari solusi kreatif untuk kemajuan bangsa.

PENGARAH

Plt. Direktur Jenderal Imigrasi

PENANGGUNG JAWAB

Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi

PEMIMPIN UMUM

Ketua Tim Humas Direktorat Jenderal Imigrasi

PEMIMPIN REDAKSI

Yolanda Rosylvia Juniar

ANGGOTA REDAKSI

Ajeng Dhyanti Paramitha, Ajeng Rahma Safitri, Arif Rahman Suryaman, Dimas Zainuddin Sukmajatnika, Elyan Nadian Zahara, Eka Safitri, Fipit Fatimah, Habil Ashari, Irdadika Natasia Tiominar, Mayza Fairda, Riski Amalia, Rr. Aditya Citraningtyas Ningrum, Yanos Okterano

PENYUNTING BAHASA

Tim Narabahasa

ILUSTRATOR SAMPUL

Gezkkii

PENATA LETAK & DESAIN

Tim Narabahasa

PERCETAKAN

Tim Narabahasa

SIRKULASI

Subbagian Humas Ditjen Imigrasi

ALAMAT REDAKSI

Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi, Lt. 8, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. X-6, No. 8, Kuningan, Jakarta Selatan

KONTAK REDAKSI

majalah.bhumipura@imigrasi.go.id

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Tulisan/ artikel yang dimuat akan mendapatkan honor sesuai standar yang berlaku.

42. Renjana

Pulau Morotai: Keindahan yang Menyimpan Sejarah

DARI REDAKSI

3. Komitmen Imigrasi untuk Indonesia

LAPORAN UTAMA

8. 75 Tahun Imigrasi Indonesia

LIPUTAN KHUSUS

12. Direktorat Kepatuhan Internal: Untuk Imigrasi yang Lebih Baik, Imigrasi yang Besar

14. Peran Krusial Direktorat TPI: Jaga Perbatasan, Tingkatkan Pelayanan pada Era Digital

KEBIJAKAN

16. *Autogate* Baru Bandara Internasional Juanda: Pemeriksaan Keimigrasian Lebih Efisien

18. Penguatan Struktur Keimigrasian: Kanwil Ditjen Imigrasi Hadir di Setiap Provinsi

KERJA KITA

20. Kolaborasi dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat: Imigrasi Tangkap Buron U.S. Marshals

21. Lebih Dekat bagi Masyarakat: Layanan Keimigrasian Hadir di MPP Kabupaten Blora

22. Gencarkan Penegakan Hukum Keimigrasian, 16 Buron DPO Internasional Ditangkap pada 2024

24. Dua WNA Pengunggah Video Konten Negatif Diamankan: Imigrasi Lakukan Konfirmasi dan Pemeriksaan

25. Langgar Hukum Keimigrasian, Tiga WNA Dideportasi dari Bali

26. Kompilasi Gakkum

KILAS PERISTIWA

28. Immigration Lounge Kini Hadir di Depok dan Surabaya

29. Wujudkan Pelayanan Publik Berkualitas, Kantor Imigrasi Surakarta Beroperasi dengan Ruangan Baru

URUS PASPOR CEPAT, SATSET, DAN BISA SAMBIL NGE-MALL DI *Immigration Lounge*

Tersedia di **7 Mal Besar** di Indonesia

Melayani **permohonan percepatan paspor elektronik**
(permohonan baru dan penggantian paspor)

Daerah Khusus Jakarta

- **Pondok Indah Mall 3, Lantai B2**
Senin-Jumat pukul 10.00-18.00 WIB
Sabtu-Minggu pukul 10.00-14.00 WIB
- **Mall Taman Angrek, Lantai LG**
Senin-Jumat pukul 10.00-18.00 WIB
Sabtu-Minggu pukul 10.00-14.00 WIB
- **Senayan City, Lantai 6**
Senin-Jumat pukul 08.00-16.00 WIB
Sabtu-Minggu pukul 08.00-14.00 WIB

Jawa Barat

- **Grand Metropolitan Mall, Bekasi**
Senin-Jumat pukul 10.00-18.00 WIB
Sabtu-Minggu pukul 10.00-14.00 WIB
- **Pesona Square Mall Depok, Lantai 3**
Senin-Jumat pukul 10.00-18.00 WIB

Jawa Timur

- **Icon Mall Gresik, Kabupaten Gresik**
Senin-Jumat pukul 10.00-18.00 WIB
- **Ciputra World Mall Surabaya, Lantai 4**
Senin-Kamis pukul 10.00-18.00 WIB
Jumat pukul 10.00-18.30 WIB

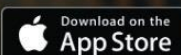
Biaya

- Paspor elektronik masa berlaku 5 tahun
Rp650.000
- Paspor elektronik masa berlaku 10 tahun
Rp950.000
- Percepatan paspor **Rp1.000.000**

Ajukan permohonan
dan daftar melalui

Aplikasi M-Paspor

Unduh sekarang di





- 30. Imigrasi Blitar Gelar Layanan Paspor Simpatik di Kampung Coklat
- 31. Paspor Palsu Tidak Terdeteksi Autogate, Tiga WN Pakistan Diamankan Imigrasi Soekarno-Hatta
- 32. Oase di Kala Efisiensi: Imigrasi Boyong Trofi PRIA 2025

INFORMATIPS

- 34. Pilih Visa Sesuai Durasi Tinggal: Bebas Visa Kunjungan atau *Visa on Arrival*

OPINI

- 36. Direktorat Tempat Pemeriksaan Imigrasi: Harapan untuk Optimalisasi TPI
- 38. Ancaman *Face Morph*: Tantangan untuk Keamanan Perbatasan dan Imigrasi

POJOKOMUNIKASI

- 40. Lepaskan FOMO, Rangkul JOMO: Temukan Kedamaian dalam Ketidakhadiran

RENJANA

- 42. Pulau Morotai: Keindahan yang Menyimpan Sejarah

INFOGRAFIK

- 44. Penerapan Paspor Elektronik 100% di Seluruh Indonesia

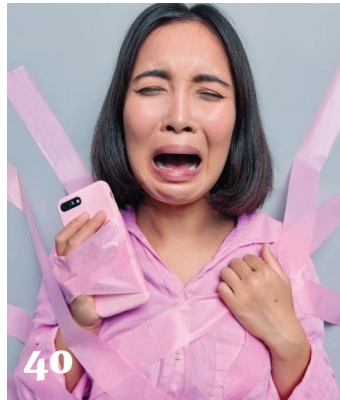
KABAR DARI SEBERANG

- 46. Hangat dan Bersahaja: Hari Bhakti Imigrasi ke-75 di Den Haag, Beijing, dan Taipei

RESENSI

- 48. Pahami Diri Sendiri dengan Hal-Hal Sederhana bersama *Who Are You?*

**49. MATA LENSA
50. KOMIK**

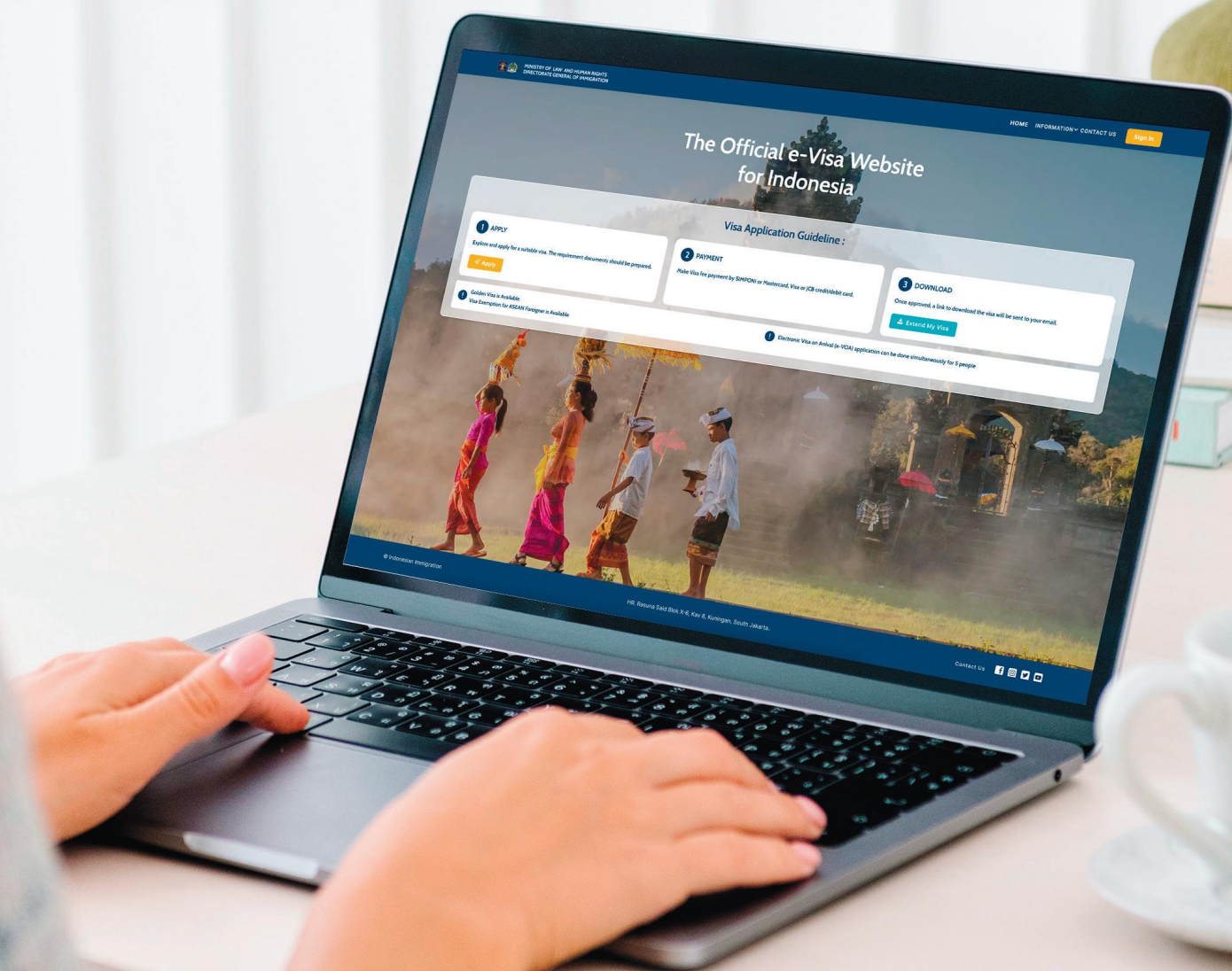


BhumiPura adalah media internal yang diterbitkan secara resmi oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Majalah ini menyajikan berita dan tulisan seputar keimigrasian secara aktual, mendalam, dan informatif. *BhumiPura* saat ini dapat dibaca atau diunduh melalui imigrasi.go.id/majalah.

Now, you can apply for
electronic visa on arrival (e-VOA),
visitor visa for tourism, and e-VOA extension

through **evisa.imigrasi.go.id**

Access now and experience the convenience!



75 TAHUN IMIGRASI INDONESIA

Mengabdikan, Melayani, dan Berinovasi

Ditjen Imigrasi membuka layanan paspor untuk 1.075 orang di Festival Imigrasi dalam rangka hari jadi ke-75. Dengan menyederhanakan seremoni, Ditjen Imigrasi berfokus pada program-program prioritas.

Penulis: Ajeng Rahma Safitri, Elyan Nadian Zahara

Pagi itu, Plaza Parkir Timur Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta sesak dengan orang-orang. Mereka terlihat membawa map berisi dokumen. Bersama kantor imigrasi se-Daerah Khusus (DK) Jakarta, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi membuka layanan paspor untuk 1.075 orang pemohon dalam Festival Imigrasi (Imifest) di Plaza Parkir Timur GBK, Senayan, Minggu (19/1).

Acara tersebut dilaksanakan dalam rangka Hari Bhakti Imigrasi (HBI) ke-75 Imigrasi Indonesia yang jatuh pada 26 Januari. Imigrasi juga kembali menggelar Immigration Run (Imirun) yang terdiri atas tiga cabang, yakni 5K, 10K, dan HM (*half marathons*). Acara Imirun tahun ini diikuti oleh 5.000 orang peserta, baik dari internal Imigrasi maupun masyarakat umum.

Dirjen Imigrasi selamati siswa Pendidikan Dasar Keimigrasian. (Sumber: antarafoto.com)



Kilas Balik Imigrasi Indonesia

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, lembaga keimigrasian memiliki peran krusial, terutama untuk mengatur lalu lintas orang dari dan ke suatu negara

Petugas imigrasi di Kantor Imigrasi Balikpapan pada akhir tahun 1950-an (Foto: Dok. Kanim Balikpapan)



Petugas imigrasi pada zaman revolusi kemerdekaan (Foto: Dok. Ditjen Imigrasi)

serta mengawasi keberadaan orang asing di negara tersebut. Kebijakan keimigrasian merupakan cerminan kedaulatan negara atas wilayahnya, baik pada masa kolonialisme maupun era modern saat ini.

Masa Hindia Belanda

Pada masa Hindia Belanda, masalah keimigrasian diatur secara fungsional dalam *Staatsblad* Tahun 1913 Nomor 105. Saat itu, kepala pemerintahan daerah di Batavia, Semarang, dan Surabaya mengangkat pejabat daerah setempat sebagai sekretaris komisi imigrasi. Komisi ini beranggotakan unsur kepolisian, karantina, dan dibantu oleh pimpinan kelompok masyarakat asing setempat.

Tiga tahun berselang, tepatnya pada 1916, juru bahasa Mandarin diangkat di Jakarta, Semarang, dan Surabaya, bersamaan dengan pengangkatan sekretaris komisi imigrasi di Pontianak. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Hindia Belanda mulai memperhatikan keberadaan orang asing dari berbagai negara, terutama Tiongkok.

Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan yang pesat di wilayah Hindia Belanda pada akhir abad ke-19 mendorong pemerintah kolonial untuk mengatur lalu lintas orang dari dan ke wilayah tersebut. Berdasarkan *Staatsblad* Tahun 1921 Nomor 13,

lembaga keimigrasian masuk dalam struktur pemerintahan Hindia Belanda yang dikenal sebagai *Immigratie Dienst* atau Dinas Imigrasi.

Meskipun demikian, kebijakan keimigrasian pada masa ini belum mendapat perhatian penuh dari pemerintah Hindia Belanda. Kebijakan yang menonjol pada saat itu adalah kebijakan penerbitan dokumen surat pernyataan orang asing.

Masa Kemerdekaan Indonesia

Pada periode 1945 hingga 1949, kebijakan keimigrasian sebagai wujud kedaulatan pemerintah Republik Indonesia diatur melalui Surat Keputusan Sekretaris Negara. Dalam surat tersebut, Kepala Departemen Yustisi diberi wewenang untuk mengatur Dinas Imigrasi dengan mengangkat inspektur urusan dalam yang membawahi 14 kantor imigrasi di wilayah Indonesia dan 2 kantor imigrasi di luar negeri.

Setelah pengakuan secara *de jure* oleh pemerintah Kerajaan Belanda atas pemerintah Republik Indonesia pada 1949, segala kewenangan pemerintahan dan lembaga pemerintahan harus diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS).

Kedaulatan keimigrasian pun diserahkan dari pemerintah Kerajaan Belanda kepada pemerintah

RIS. Yusuf Adiwinata diangkat sebagai Kepala Jawatan Imigrasi yang untuk pertama kalinya dijabat oleh seorang warga negara Indonesia.

Surat penetapan tersebut berlaku surut sejak tanggal penyerahan kedaulatan keimigrasian, yaitu tanggal 26 Januari. Tanggal inilah yang kemudian diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Imigrasi Indonesia.

Imigrasi Masa Kini

Sejak penyerahan surat penetapan tersebut hingga sekarang, telah banyak transformasi yang terjadi dalam dunia keimigrasian Indonesia. Sejumlah inovasi digital seperti visa elektronik, aplikasi M-Paspor, implementasi *autogate*, *golden visa*, aplikasi penegakan hukum, hingga digitalisasi izin tinggal telah berkontribusi memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan perekonomian negara.

Lalu, melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 157 Tahun 2024, dibentuklah Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Imipas). Di bawah kepemimpinan Menteri Imipas Agus Andrianto dan Wakil Menteri Imipas Silmy Karim, fokus Imigrasi ditujukan pada layanan digital, pengembangan *autogate*, pencegahan perdagangan orang, serta penguatan pengawasan keimigrasian di pintu gerbang negara.

Dengan mengusung tema "Melayani,

Mengabdikan, dan Berinovasi" pada hari jadi ke-75 ini, Imigrasi menggelar beberapa acara dan membuka pelayanan pengurusan paspor.

"Layanan 1.075 paspor dalam rangka Hari Bhakti Imigrasi ke-75 ini bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang tidak memiliki waktu [untuk] mengurus paspor pada hari kerja. Lokasinya di GBK sehingga memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang sekaligus ingin berolahraga [pada] akhir pekan. Alhamdulillah, layanan ini mendapat antusiasme yang sangat baik dari masyarakat," tutur Menteri Imipas Agus Andrianto yang meninjau langsung layanan tersebut.

Kuota layanan paspor di GBK telah dibuka sejak 2 Januari 2025 di aplikasi M-Paspor. Masyarakat yang ingin mengurus paspor pada acara ini harus mendaftarkan permohonannya terlebih dahulu melalui aplikasi tersebut. Layanan paspor yang diberikan di GBK adalah pembuatan paspor baru dan penggantian paspor. Sementara itu, jenis paspor yang diterbitkan adalah paspor elektronik lembar laminasi dan paspor elektronik lembar polikarbonat.

Dalam waktu empat hari kerja, pemohon layanan paspor di GBK dapat mengambil paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan. Pemohon juga dapat mengajukan agar paspornya dikirim

langsung ke rumah melalui pos dengan menghampiri gerai Pos Indonesia yang tersedia usai melakukan wawancara.

Sementara itu, Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Saffar M. Godam mengatakan, penyelenggaraan Imirun merupakan upaya Ditjen Imigrasi dalam berkontribusi membangun kebiasaan masyarakat Indonesia yang sehat.

"Seperti yang sering kita lihat, acara olahraga selalu bisa menjadi momen yang mempersatukan semua orang. Adanya Imirun ini menunjukkan bahwa Imigrasi ingin bisa dekat dengan masyarakat luas. Kami mendukung kebiasaan dan gaya hidup masyarakat yang sehat. Semoga acara ini juga mendorong semangat petugas imigrasi untuk lebih sehat dan prima supaya pelayanan dan pengawasan keimigrasian senantiasa berjalan optimal," ungkap Godam.

Flag off Imirun dimulai pada pukul 05.30 WIB dan *last finish* berakhir pada pukul 09.40 WIB. Selain olahraga lari, pengunjung juga dapat bergabung dalam olahraga zumba yang dipandu oleh Rocca Space.

Masyarakat yang hadir di Festival Imigrasi (Imifest) juga dapat berkunjung ke 15 gerai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berpartisipasi dalam acara ini. Di samping itu, tersedia pula layanan kesehatan gratis berupa konsultasi dengan dokter, yaitu

Kesederhanaan seremoni Hari Bhakti Imigrasi ke-75 (Foto: Aditdja Pratama Gegana Uwen)



“SAYA BERHARAP IMIGRASI DAPAT MAKIN ADAPTIF, PROFESIONAL, DAN DEKAT DENGAN RAKYAT. MARI KITA BERSAMA-SAMA MELANGKAH LEBIH JAUH DAN LEBIH KUAT, DEMI INDONESIA YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA.”

pengecekan tekanan darah dan kadar gula darah. Acara ini juga menghadirkan hiburan serta *doorprize* bagi peserta Imirun.

“Imigrasi sudah melalui perjalanan panjang, selama 75 tahun melayani bangsa dan menjaga kedaulatan negara. Kami terus berupaya memberikan inovasi layanan yang memudahkan masyarakat, seperti yang terlihat dalam Festival Imigrasi dan Imirun tahun ini. Saya berharap Imigrasi dapat makin adaptif, profesional, dan dekat dengan rakyat. Mari kita bersama-sama melangkah lebih jauh dan lebih kuat, demi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera,” tutur Menteri Imipas Agus Andrianto.

Sederhanakan Seremoni, Kerucutkan Fokus

Sementara itu, peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke-75 Imigrasi Indonesia baru diselenggarakan pada Jumat (31/1) dengan syukuran sederhana. Acara ini diadakan secara serentak di lingkungan internal Ditjen Imigrasi, baik kantor pusat, kantor wilayah, maupun kantor imigrasi dan rumah detensi, di seluruh Indonesia.

“Penyederhanaan dalam kegiatan seremonial ini menjadi bentuk dukungan efisiensi anggaran negara. Anggaran yang berhasil dihemat dari penyelenggaraan acara ini akan dialokasikan untuk program-program lain yang lebih mendesak dan berdampak kepada masyarakat, sejalan dengan arahan Bapak Presiden,” ungkap Agus.

Syukuran Hari Bhakti Imigrasi tahun ini dilaksanakan lebih sederhana dengan susunan acara sederhana dengan pemotongan tumpeng, doa bersama, dan pemutaran video sejarah keimigrasian. Pelaksanaan seremoni di tingkat wilayah, unit pelaksana teknis (UPT), dan perwakilan RI dibatasi hingga 15 orang peserta untuk



Antusiasme para peserta Immigration Run di Festival Imigrasi (Foto: Jimmy Asmoro)

menjaga efisiensi dan fokus pada esensi peringatan.

Dalam syukuran Hari Bhakti Imigrasi ke-75, Ditjen Imigrasi juga menyelenggarakan sesi “Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Menyapa” yang dilaksanakan secara virtual melalui konferensi video. Dalam konferensi ini, Menteri Imipas berinteraksi dengan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Kalimantan Barat Haryono Agus Setiawan beserta pemangku kebijakan seperti Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bengkayang, Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan (Pamtas), serta pelaku UMKM.

Dalam kesempatan tersebut, dibahas pula distribusi bantuan sosial bagi masyarakat perbatasan di Kalimantan Barat yang mengalami musibah banjir. Distribusi bantuan sosial dilakukan dalam dua tahap. Sebanyak 310 paket didistribusikan pada 31 Januari 2025 di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Jagoi Babang dan 1.800 paket selesai didistribusikan sebelum 7 Februari 2025 ke desa-desa yang terdampak banjir di wilayah Kecamatan Siding dan Jagoi. Dalam konferensi tersebut, dibahas pula *corporate social responsibility* (CSR) atau konsep bisnis yang mengintegrasikan keprihatinan sosial, lingkungan, dan etika untuk UMKM.

Agus juga berinteraksi dengan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Tengah Is Edy Eko Putranto untuk membahas rencana pembentukan kantor imigrasi di Blora. Rencana ini sebagai salah satu program perluasan

layanan keimigrasian di Indonesia.

Tidak hanya itu, secara virtual, Menteri Imipas mengundang perwakilan petugas imigrasi yang bertugas di PLBN Skouw, Papua, Oliver Marsel Ferre, untuk berbagi kisah tentang kesehariannya dalam bertugas.

Bicara mengenai pelaksanaan efisiensi sesuai amanat Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025, Agus menyampaikan bahwa efisiensi ini tidak hanya diterapkan di tingkat pusat, tetapi juga kantor wilayah dan kantor imigrasi serta rumah detensi di seluruh Indonesia. Hal ini mencerminkan semangat kolaborasi dan tanggung jawab bersama dalam mendukung keberlanjutan pembangunan bangsa.

Syukuran Hari Bhakti Imigrasi ke-75 ini merupakan acara puncak dari rangkaian peringatan hari jadi Imigrasi yang dilaksanakan sepanjang Januari 2025. Acara-acara yang sebelumnya digelar dalam rangka Hari Bhakti Imigrasi, antara lain, layanan Paspor Simpatik, donor darah, bakti sosial di semua satuan kerja Imigrasi se-Indonesia, Immigration Run, dan pelayanan 1.075 paspor dalam Festival Imigrasi yang bertempat di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.

“Momentum ini bukan sekadar peringatan hari jadi, tetapi juga pengingat akan tanggung jawab kita untuk terus berinovasi dan melayani masyarakat dengan lebih baik. Kami percaya, efisiensi dan kebersamaan dalam pelaksanaan acara justru akan memperkuat makna peringatan ini,” tutup Agus. ■

Direktorat Kepatuhan Internal:

UNTUK IMIGRASI YANG LEBIH BAIK, IMIGRASI YANG BESAR

Dalam upaya menjadi Imigrasi yang besar, Direktorat Kepatuhan Internal hadir untuk melakukan pengawasan dan penertiban. Tidak hanya soal kinerja, pelanggaran yang dapat dilaporkan juga termasuk yang terjadi di luar kedinasan.

■ Penulis: Irnadika Natasia T.

"The first great law is to obey (Hukum besar yang pertama adalah mematuhi)," begitu kata penyair asal Jerman, Friedrich Schiller. Kepatuhan menjadi hal fundamental dalam sebuah institusi. Tanpa adanya kepatuhan, sistem tidak dapat berjalan dengan baik, dan kekacauan menjadi buah yang akan dipetik.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi memiliki direktorat baru, yakni Direktorat Kepatuhan Internal. Redaksi *BhumiPura* berkesempatan melakukan wawancara eksklusif dengan Barron Ichsan sebagai Direktur Kepatuhan Internal. Alumnus Akademi Imigrasi (AIM) Angkatan IV yang hobi bersepeda ini membagikan visinya dalam memimpin Direktorat Kepatuhan Internal untuk mewujudkan "Imigrasi yang lebih baik, Imigrasi yang besar".

Direktur Kepatuhan Internal Barron Ichsan saat wawancara dengan tim Humas Ditjenim (Foto: Arif Rahman Suryaman)



Apa lingkup pekerjaan Direktorat Kepatuhan Internal?

Direktorat Kepatuhan Internal mengupayakan setiap petugas imigrasi agar bisa lebih tertib dalam melakukan pekerjaan dan prosedur operasional standar (SOP), tertib dalam hubungan dengan Tuhannya, serta tertib dalam hubungan rumah tangga dan lingkungannya. Apabila terjadi pelanggaran, direktorat ini hadir untuk menertibkan dan mengembalikan nama baik institusi.

Apa fokus utama kinerja Direktorat Kepatuhan Internal?

Fokus kami adalah melakukan pencegahan. Konsep direktorat ini bagi saya bukan sebagai "pemadam kebakaran". Saya mengupayakan langkah-langkah preventif yang nantinya akan dibantu oleh Subdirektorat (Subdit) Pengendalian dan Koordinator Fungsional Pengelolaan Data sehingga kami bisa memiliki data terkait pekerjaan petugas imigrasi. Data yang kami miliki akan kami manfaatkan untuk upaya preventif tersebut.

Apa saja tantangan utama saat ini?

Karena ini adalah direktorat baru, pastinya ada tantangan besar. Saat ini, Direktorat Kepatuhan Internal belum memiliki sumber daya manusia (SDM), payung hukum, ruangan, dan anggaran. Kemudian, ada efisiensi dan pengadaan sarana prasarana (sarpras) penunjang yang juga menjadi tantangan tersendiri. Meskipun demikian, semua laporan yang masuk akan kami tindak lanjuti. Namun, saat ini baru sampai tahap pemanggilan dan pemeriksaan.

Apakah ada tantangan tersendiri dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi?

Kemungkinan kami akan mendapatkan resistensi yang saya harap tidak akan besar. Saat ini, yang sedang saya sosialisasikan adalah kalau ingin organisasi menjadi besar, kita harus siap berbenah. Hadirnya Direktorat Kepatuhan Internal ini untuk mendukung itu. Menyosialisasikan

kepatuhan internal kepada insan Imigrasi juga menjadi tantangan karena banyak yang belum terbiasa dengan adanya pengawasan.

Bagaimana prosedur dalam menerima laporan?

Untuk sementara, kami masih menerima laporan secara manual dari masyarakat. Ada kanal pengaduan yang disiapkan oleh Biro Hukum dan Kerja Sama (Sekretariat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan) dan kanal informasi yang dimiliki Humas Ditjen Imigrasi. Kami juga sedang menyusun WBS (*whistleblowing system*).

Apa saja yang bisa diadukan?

Semua pelanggaran yang dilakukan oleh petugas, baik di dalam maupun luar kedinasan. Jadi, tidak hanya mengenai performa pekerjaan. Selain itu, kami juga memonitor media sosial dan media daring lainnya. Jika ada pengaduan mengenai petugas imigrasi, akan kami tindak lanjuti.

Bagaimana seharusnya penggunaan media sosial oleh petugas imigrasi?

Gunakan media sosial dengan bijak. Perhatikan konten yang diunggah agar tidak terkesan memamerkan gaya hidup mewah atau barang-barang bermerek. Dengan mempertimbangkan keadaan, petugas diharapkan agar lebih sensitif dalam mengunggah konten.

Identitas Imigrasi itu melekat pada petugas saat menggunakan media sosial. Orang yang tidak tahu Imigrasi bisa mendapat impresi tentang Imigrasi dari unggahan media sosial petugasnya.

Hingga saat ini, bagaimana Direktorat Kepatuhan Internal mencegah atau mengatasi pelanggaran di tubuh Imigrasi? Apakah ada contoh kasus yang berhasil?

Dalam waktu tiga bulan, kasus yang sudah kami periksa sebanyak 158 orang petugas imigrasi. Dari 158 kasus, sudah 79 kasus yang diusulkan untuk dilakukan penindakan dan diteruskan ke Inspektorat Jenderal untuk ditangani.

Apakah Direktorat Kepatuhan Internal tidak langsung memberikan hukuman?

Direktorat Kepatuhan Internal tidak memberikan hukuman apa pun kepada petugas, tetapi melakukan pemeriksaan awal dan memberikan rekomendasi, baik dalam hukuman disiplin maupun kelayakan untuk menduduki jabatan. Kehadiran Direktorat Kepatuhan Internal tidak semata-mata untuk menyalahkan terlapor, tetapi juga melakukan *cross-check* kebenaran berita yang diberikan oleh pelapor.

Bagaimana Direktorat Kepatuhan Internal berkolaborasi dengan unit kerja lain dan pihak eksternal untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan kepatuhan?

Direktorat Kepatuhan Internal punya hubungan dengan semua direktorat di bawah Ditjen Imigrasi sampai ke tingkat unit pelaksana teknis (UPT). Ini karena proses bisnis (*business process*) dioperasikan oleh petugas imigrasi. Petugas imigrasi adalah klien di Direktorat Kepatuhan Internal.

Kami mendapat arahan untuk melakukan koordinasi dengan beberapa instansi, seperti Polri, KPK, PPATK, dan sebagainya. Diharapkan ke depannya Direktorat Kepatuhan Internal akan memiliki akses untuk menelusuri transaksi keuangan dari seluruh petugas imigrasi.

Bagaimana perlindungan identitas pelapor?

Identitas pelapor hanya diketahui admin dari Koordinator Fungsional Pengelolaan Data dan Direktur Kepatuhan Internal sehingga pelapor tidak perlu khawatir. Identitas pelapor akan kami lindungi. Sampai sekarang belum ada pelapor yang meminta identitasnya ditutupi karena sifatnya pengaduan. Namun, ke depannya WBS yang kami buat akan melindungi identitas pelapor.

Apakah ada pesan dari Bapak untuk petugas imigrasi tentang kepatuhan terhadap peraturan?

Ayo hindari pelanggaran, baik yang berhubungan dengan pekerjaan, lingkungan, rumah tangga, maupun agama masing-masing. Saya mengajak seluruh insan Imigrasi untuk berbenah menuju Imigrasi yang lebih baik, Imigrasi yang besar. ■

"BAGI KAMI, PENINDAKAN PETUGAS BUKANLAH SUATU KEBANGGAAN. IMIGRASI YANG AMAN MARI KITA WUJUDKAN."

Peran Krusial Direktorat TPI:

JAGA PERBATASAN, TINGKATKAN PELAYANAN PADA ERA DIGITAL

TPI menghadapi beragam tantangan keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan. Berbagai teknologi canggih digunakan untuk efektivitas dan efisiensi pengawasan.

“A nation that cannot control its borders is not a nation.” - Ronald Reagan

■ Penulis: Ajeng Dhyanti Paramitha

Pada era globalisasi ketika mobilitas manusia menjadi makin tinggi, peran tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) menjadi krusial dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Bagaimana Direktorat Tempat Pemeriksaan Imigrasi mengevaluasi efektivitas sistemnya? Apa saja yang dihadapi dan inovasi apa yang diterapkan untuk meningkatkan pelayanan pada TPI?

Redaksi *BhumiPura* mewawancarai Direktur Tempat Pemeriksaan Imigrasi Suhendra untuk mendapatkan penjelasan lengkap tentang direktorat yang baru diresmikan pada 2024 ini.

Apa saja tantangan utama dalam hal lalu lintas orang yang dihadapi Direktorat Tempat Pemeriksaan Imigrasi?

Tantangan yang kami hadapi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan cukup beragam. *Pertama*, dinamika kejahatan lintas batas dengan berbagai jenis dan modus. *Kedua*, peningkatan volume lalu lintas orang yang menuntut adanya metode khusus untuk mengatasi masalah volume, kelancaran pemeriksaan, dan deteksi risiko secara bersamaan.

Ketiga, keterbatasan infrastruktur dan SDM yang menuntut kreativitas dan ketangguhan dari petugas di lapangan. *Terakhir*, untuk menghadapi dinamika global, kami terus beradaptasi dengan mengikuti perkembangan metode pemeriksaan di perbatasan negara lain dan menyesuaikan kebijakan keimigrasian kami dengan standar internasional (ICAO Annex 9 Facilitation).

Bagaimana efektivitas sistem pemeriksaan imigrasi yang ada

saat ini dievaluasi? Area mana yang memerlukan peningkatan atau perbaikan?

Kami mengevaluasi efektivitas sistem pemeriksaan imigrasi saat ini dengan menggunakan beberapa indikator utama, yaitu waktu pemeriksaan, deteksi risiko, pemanfaatan teknologi, kepuasan pengguna jasa, dan kinerja petugas.

Dari segi waktu dan efisiensi layanan, kami menetapkan batas waktu pemeriksaan maksimal sekitar satu menit per penumpang untuk konter manual. Hal ini penting untuk menghindari antrean panjang yang dapat mengganggu kenyamanan dan efisiensi.

Selanjutnya, kami juga mengevaluasi kemampuan petugas dalam mendeteksi risiko, seperti pemalsuan dokumen, impostor, penyelundupan manusia, dan kejahatan lintas batas lainnya. Petugas dilatih untuk mengidentifikasi penumpang berisiko tinggi dan rendah dalam durasi waktu yang ditentukan.

Selain itu, kami juga secara rutin melakukan survei kepuasan penumpang dan menangani pengaduan dengan serius. Terakhir, kami berupaya melakukan standardisasi pada semua lini, baik dari SDM maupun teknologi. Ini penting untuk menjamin kualitas pemeriksaan yang merata di seluruh TPI di Indonesia.

Bagaimana TPI memanfaatkan teknologi dan sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemeriksaan imigrasi, serta mengurangi potensi kesalahan atau penyalahgunaan?

Pemeriksaan imigrasi kini makin cepat dan akurat berkat dua teknologi canggih

yang kami miliki: *autogate* dengan *face recognition* dan unit analisis penumpang (UAP). *Autogate* memangkas waktu pemeriksaan dari 1-2 menit menjadi hanya 15-25 detik, sementara UAP memproses data penumpang secara digital untuk deteksi risiko dini. Kombinasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemeriksaan, tetapi juga memberdayakan petugas dengan teknologi mutakhir untuk meminimalkan kesalahan dan penyalahgunaan.

Bagaimana TPI mengantisipasi dan menghadapi potensi lonjakan jumlah penumpang atau wisatawan yang datang ke Indonesia, terutama pada musim liburan atau momentum besar?

Kami menganalisis data historis dan tren kedatangan. Dengan itu, kami mampu memprediksi waktu-waktu peningkatan signifikan akan jumlah penumpang.

Untuk mengahadapinya, kami melakukan penyesuaian *shift* dan penambahan petugas di jam-jam sibuk disertai dengan tambahan perangkat *mobile unit*. Kami juga berkoordinasi dengan *stakeholder* bandara/pelabuhan untuk menyelaraskan langkah penanganan.

Selain itu, kami juga bersurat kepada perwakilan asing negara tetangga serta seluruh maskapai internasional guna mengimbau agar setiap orang asing subjek VoA (*visa on arrival*) atau BVK (bebas visa kunjungan) telah melakukan pembelian e-VoA (*electronic visa on arrival*) atau telah melakukan registrasi BVK pada saat *check-in* dan penerbitan *boarding pass*. Langkah ini diharapkan dapat lebih meningkatkan penggunaan *autogate* di TPI besar. Tercatat saat ini, di seluruh TPI, penggunaan *autogate* oleh penumpang telah mencapai 42%.

Bagaimana TPI merespons pengaduan atau laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran atau penyimpangan dalam proses pemeriksaan imigrasi?

TPI akan menerapkan sistem pengaduan warga negara asing (WNA) berbasis

kode QR secara nasional, dimulai dari TPI Soekarno-Hatta. Pengaduan akan direspons cepat oleh tim dari kantor imigrasi dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, serta dimonitor oleh kami dari Direktorat Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Direktorat Kepatuhan Internal, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, serta Humas Ditjen Imigrasi. Sistem ini menjamin penanganan pengaduan yang jelas, terbuka, dan mudah diakses.

Apa rencana pengembangan TPI pada masa depan, termasuk inisiatif-inisiatif baru yang akan diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan?

TPI berkomitmen meningkatkan kualitas layanan dan pengawasan perbatasan melalui modernisasi

Bapak sampaikan kepada petugas imigrasi di TPI seluruh Indonesia?

Pesan saya kepada seluruh petugas imigrasi di lapangan: bekerjalah dengan dedikasi, profesionalisme, dan integritas. Kalian adalah garda terdepan penjaga keamanan dan kedaulatan negara, serta wajah pertama Indonesia di mata dunia. Berikan pelayanan yang ramah tetapi tegas, patuhi aturan, dan ingatlah bahwa tugas kalian adalah amanat besar. Jadilah teladan dan terus tingkatkan profesionalisme. Indonesia bangga memiliki kalian!



Direktur Tempat Pemeriksaan Imigrasi Suhendra
(Foto: Arif Rahman Suryaman)

berbasis digitalisasi dan teknologi tinggi, termasuk kecerdasan buatan. Petugas akan dilatih untuk menyinergikan peran dengan teknologi sehingga mampu mengoperasikan sistem digital yang canggih. Dengan penyesuaian struktur organisasi, peningkatan kompetensi petugas, dan integrasi teknologi, TPI siap menghadirkan layanan imigrasi yang lebih responsif dan modern.

Sebagai Direktur Tempat Pemeriksaan Imigrasi, apakah ada pesan yang ingin

DIGITALISASI DI TPI MENYINERGIKAN PETUGAS DENGAN TEKNOLOGI CANGGIH SEHINGGA MENGHASILKAN PEMERIKSAAN PERBATASAN YANG LEBIH CEPAT DAN EFISIEN.

Autogate Baru Bandara Internasional Juanda:

PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN LEBIH EFISIEN

Autogate Bandara Internasional Juanda tingkatkan kenyamanan pelaku perjalanan internasional. Penumpang hanya membutuhkan waktu 15 hingga 25 detik untuk menyelesaikan verifikasi.

■ Penulis: Dimas Zainuddin Sukmajatnika

Dalam upaya optimalisasi layanan keimigrasian, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi dan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya melengkapi Bandara Internasional Juanda di Surabaya dengan 28 unit *autogate* baru. Kehadiran *autogate* ini bertujuan untuk mempercepat pemeriksaan keimigrasian serta meningkatkan kenyamanan bagi para pelaku perjalanan internasional.

Autogate terbaru ini ditempatkan di Terminal 2 Bandara Internasional Juanda. Sebanyak 18 unit tersedia untuk keberangkatan internasional dan 10 unit untuk kedatangan internasional.

“Penempatan ini memungkinkan alur keluar masuk penumpang berjalan lebih lancar dan efisien sehingga memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna penerbangan internasional,” ujar Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan

Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan meninjau *autogate* di Bandara Internasional Juanda. (Foto: Dimas Z.)



Agus Andrianto yang hadir untuk meresmikan dan memantau langsung pemasangan *autogate* di Bandara Internasional Juanda pada Rabu (15/1).

Peresmian *autogate* ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk jajaran pemerintah yang ikut terlibat, yaitu Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono. Adhy juga mengingatkan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat agar makin banyak pelaku perjalanan yang memahami dan memanfaatkan teknologi ini secara optimal.

Autogate yang telah dioperasikan ini dilengkapi dengan teknologi mutakhir, termasuk pemindai pengenalan wajah (*face recognition*) serta sistem manajemen perbatasan atau *border control management* (BCM). Dengan sistem ini, proses pemeriksaan imigrasi menjadi jauh lebih cepat. Penumpang hanya membutuhkan waktu sekitar 15 hingga 25 detik untuk menyelesaikan verifikasi.

Mekanismenya cukup sederhana. Penumpang cukup pemindai paspor elektronik mereka pada mesin pemindai yang tersedia. Sistem akan otomatis melakukan pemeriksaan identitas serta izin masuk atau keluar. Dengan skema ini, Bandara Internasional Juanda berupaya memastikan bahwa baik warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA) dapat merasakan manfaat dari sistem imigrasi yang lebih modern dan efisien.

Dengan hadirnya *autogate* di Bandara Internasional Juanda, para penumpang internasional kini dapat menikmati proses imigrasi yang lebih cepat, nyaman, dan bebas antrean panjang. Pada era mobilitas global yang makin meningkat, penerapan teknologi seperti ini menjadi langkah strategis dalam memastikan bahwa pelayanan keimigrasian tetap responsif terhadap kebutuhan para pelaku perjalanan.

Secara keseluruhan, pengoperasian *autogate* di Bandara Internasional Juanda menandai babak baru dalam digitalisasi layanan keimigrasian di Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi mutakhir, bandara ini siap menjadi salah satu pusat perjalanan internasional sekaligus memperkuat posisinya sebagai gerbang utama bagi pelintas berkualitas untuk masuk ke Indonesia. ■

Layanan Percepatan Penerbitan Paspor Sabtu—Minggu

HANYA MELAYANI PERMOHONAN PASPOR BARU & PENGGANTIAN PASPOR

Hadir di lokasi berikut:

Unit Pelayanan Percepatan Paspor (UP3)
Lippo Mall Puri Lantai Basement
Waktu pelayanan: 08.30—11.00 WIB

Unit Layanan Paspor (ULP)
Pasar Pagi Mangga Dua
Waktu pelayanan: 09.00—11.00 WIB

UP3 Lippo Mall Kemang
Area Parkir 5B Lantai 2
Waktu pelayanan: 10.30—11.00 WIB

UP3 Terminal 3 Internasional
Bandara Soekarno-Hatta
Waktu pelayanan: 09.00—11.00 WIB

UP3 Plaza Semanggi
Waktu pelayanan: 09.30—12.00 WIB

UP3 Mall Cibubur Junction
Waktu pelayanan: 09.00—11.00 WIB



Siapkan Dokumen Persyaratan

- Bagi pemohon dewasa:
 - KTP-el, kartu keluarga (KK), akta kelahiran/ijazah/buku nikah/surat baptis
 - Paspor lama (bagi yang telah memiliki paspor)
- Bagi pemohon anak di bawah umur:
 - KTP-el orang tua, KK, akta kelahiran/surat baptis
 - Bukti menikah orang tua yang sah
 - Paspor orang tua (pendamping)
 - Paspor lama (bagi yang telah memiliki paspor)

Dapatkan informasi lebih lanjut melalui Instagram: @kanimjaksel, @kanimjakpus_, @imigrasi.soekarnohatta, @imigrasi_jakut, @imigrasi_jakbar, @imigrasijaktim.

Penguatan Struktur Keimigrasian: **KANWIL DITJEN IMIGRASI HADIR DI SETIAP PROVINSI**

Setelah bergabung dengan Kementerian Imipras, Ditjen Imigrasi memiliki kanwil di 33 provinsi. Kehadiran kanwil diharapkan memperkuat struktur kelembagaan Ditjen Imigrasi dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di daerah.

■ Penulis: Elyan Nadian Zahara

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi telah resmi bergabung dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Imipras) pada Oktober 2024 lalu. Kini, struktur kelembagaan Ditjen Imigrasi diperkuat dengan hadirnya kantor wilayah (kanwil) Ditjen Imigrasi di 33 provinsi di Indonesia.

Sebelumnya, dalam struktur Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Imigrasi di setiap provinsi diwakili melalui struktur Divisi Keimigrasian yang berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Kanwil Ditjen Imigrasi memiliki peran strategis dalam mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di daerah. Dukungan tersebut khususnya untuk membina, mengawasi, mengevaluasi, serta melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian dari satuan kerja (satker) di wilayahnya.

Berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, kantor wilayah Ditjen Imigrasi dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu tipe A dan tipe B. Klasifikasi kantor wilayah didasarkan pada skoring nilai akhir dari dua kelompok variabel, yaitu variabel utama dan variabel penunjang.

"Setiap kanwil kami klasifikasikan berdasarkan skoring dari indikator-indikator, baik pada variabel utama maupun penunjang. Kami lihat beban



Petugas imigrasi sedang melayani pemohon paspor di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere (Foto: Arif Rahman Suryaman)

kerjanya seperti apa, kedudukannya di mana, seperti itu," jelas Sekretaris Ditjen Imigrasi Sandi Andaryadi.

Lebih lanjut, Sandi menjelaskan bahwa variabel utama mencakup indikator-indikator yang menunjukkan peran dan tanggung jawab utama kanwil. Indikator-indikator variabel utama, antara lain, membawahi kantor imigrasi kelas I khusus dan/atau rumah detensi imigrasi pusat, membawahi paling sedikit 6 unit pelaksana teknis, serta mengoordinasikan kantor imigrasi yang menjalankan fungsi pemeriksaan keimigrasian.

Selain itu, klasifikasi juga mempertimbangkan variabel penunjang. Indikator-indikator variabel penunjang, antara lain, kedudukan di ibu kota negara atau provinsi daerah otonomi khusus, wilayah yang membawahi program nasional yang bersifat strategis, kawasan industri, atau kawasan ekonomi khusus; dan rentang kendali satuan kerja berdasarkan kepadatan penduduk.

Penetapan klasifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja kantor wilayah Ditjen Imigrasi dalam memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.

Saat ini, terdapat 10 kanwil Ditjen Imigrasi tipe A di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Selatan. Sebanyak 23 kanwil lainnya merupakan kanwil tipe B.

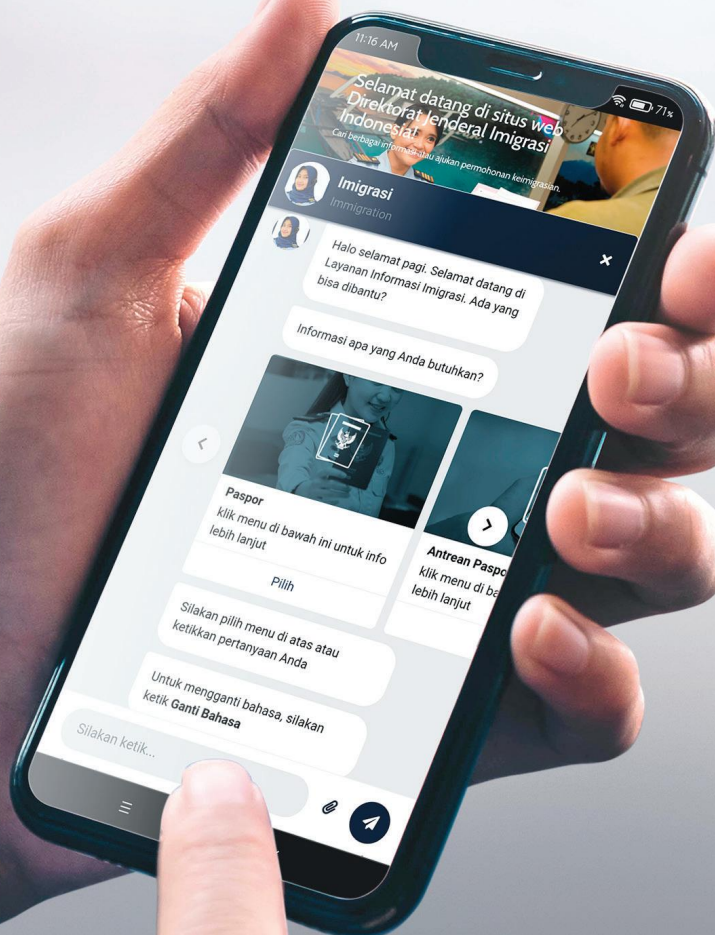
"Dengan hadirnya kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi di setiap provinsi, kami harap kualitas pelayanan bisa meningkat. Pengawasan dan penegakan hukum [juga] bisa makin kuat sehingga dapat mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban di wilayah Indonesia," tutup Sandi. ■

Tampilan depan Kantor Imigrasi Bogor (Foto: Arif Rahman Suryaman)



Punya pertanyaan soal **keimigrasian?** Tanya kami melalui layanan **Livechat** Ditjen Imigrasi di **www.imigrasi.go.id**

Setiap hari kerja **Senin—Jumat**
pukul **09.00—15.00 WIB**



Kolaborasi dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat: **IMIGRASI TANGKAP BURON U.S. MARSHALS**

Kerja sama antara Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kedutaan Besar Amerika Serikat berhasil mengungkap keberadaan buron U.S. Marshals berinisial TJC di Indonesia. Kini, terdakwa TJC diamankan di Ruang Detensi Direktorat Jenderal Imigrasi untuk menunggu proses hukum selanjutnya.

■ Penulis: Ajeng Rahma Safitri



Konferensi pers penangkapan WN Amerika Serikat buron U.S. Marshals (Foto: Arif Rahman Suryaman)

TJC, buron U.S. Marshals atas kasus eksploitasi seksual, upaya eksploitasi anak, dan kepemilikan pornografi anak diamankan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi pada 30 Desember 2024. Penangkapan warga negara (WN) Amerika Serikat tersebut dilakukan setelah upaya penyelidikan oleh tim penyidikan Ditjen Imigrasi serta koordinasi intensif dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat.

TJC menghadapi sejumlah tindak pidana serius, di antaranya eksploitasi seksual dan percobaan

eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur. Tindakan ini mencakup produksi materi eksploitasi seksual anak. Selain itu, ia juga didakwa atas kepemilikan pornografi anak berupa penyimpanan gambar eksplisit anak di bawah umur untuk didistribusikan atau konsumsi pribadi. Berbagai tindakan ini menempatkan TJC dalam proses hukum di bawah yurisdiksi Pengadilan Distrik Selatan Iowa, Amerika Serikat.

"TJC kami tangkap di Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Tangerang saat mengajukan perpanjangan izin tinggal kunjungan. Berkat patroli siber oleh tim

penyidikan, lokasi pelaku terdeteksi melalui sistem perpanjangan izin tinggal daring. Tim gabungan langsung menangkapnya dengan sigap dan tanpa kendala," ungkap Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Yuldi Yusman pada Kamis (9/1).

Pria 43 tahun tersebut tercatat masuk ke wilayah Indonesia pada Rabu (4/12/2024). Pada Rabu (18/12/2024), Ditjen Imigrasi menerima informasi dari Kedutaan Besar Amerika Serikat bahwa paspor TJC telah dicabut sehingga statusnya tidak sah. Hal tersebut dikonfirmasi melalui surat Kedutaan Besar Amerika Serikat nomor JAK.OCI.24.075 yang menjadi dasar Ditjen Imigrasi menerbitkan surat perintah pencegahan dan prapenyidikan.

Yuldi menyatakan, pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan terhadap orang asing di Indonesia, khususnya yang terindikasi terlibat dalam kejahatan internasional. "Kami memastikan bahwa Indonesia tidak menjadi tempat berlindung bagi pelaku kejahatan lintas negara," tuturnya.

Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Saffar M. Godam menyampaikan bahwa saat ini TJC ditempatkan di Ruang Detensi Direktorat Jenderal Imigrasi untuk pemeriksaan yang lebih lanjut. Sementara itu Ditjen Imigrasi juga telah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk proses hukum selanjutnya.

"Ini adalah bukti nyata komitmen Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjaga integritas hukum dan melindungi Indonesia dari pelaku kejahatan internasional. Kerja sama yang erat dengan berbagai pihak, termasuk Kedutaan Besar Amerika Serikat, sangat membantu proses ini," tutup Godam. ■

Lebih Dekat bagi Masyarakat: **LAYANAN KEIMIGRASIAN HADIR DI MPP KABUPATEN BLORA**

Warga Kabupaten Blora kini dapat mengurus paspor dengan lebih mudah. Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Pati membuka layanan keimigrasian di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Blora dan diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan keimigrasian.

■ Penulis: Junaidul Fitriyono

Mulai 7 Januari 2025, Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Pati hadir di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Blora.

Berlokasi di Jalan Raya Blora-Cepu Km 5, layanan ini tersedia pada Senin sampai dengan Jumat pada jam kerja. Warga Kabupaten Blora kini tidak perlu melakukan perjalanan jauh untuk membuat paspor. Sebelumnya, warga harus menempuh jarak lebih dari 80 km atau 2 jam perjalanan darat untuk mengurus paspor di Kantor Imigrasi Pati.

Layanan ini dapat terwujud setelah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) terkait pelayanan keimigrasian antara Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Kelas I Non-TPI Pati dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Blora.

Kakanim Kelas I Non-TPI Pati Ahmad Zaeni berharap pelayanan keimigrasian di MPP Kabupaten Blora bisa lebih baik daripada periode sebelumnya dari sisi kualitas dan kuantitas.

"Sebelumnya, layanan penerbitan paspor di MPP Blora dilaksanakan sebulan sekali. Melihat antusiasme masyarakat yang sangat tinggi, kami berinisiatif menambah layanan keimigrasian," ujar Zaeni.

Saat ini, layanan keimigrasian di MPP Blora hanya menangani penerbitan paspor elektronik dengan masa berlaku 5 dan 10 tahun. Dengan makin berkembangnya industri dan meningkatnya roda ekonomi di Kabupaten Blora, tidak menutup kemungkinan layanan keimigrasian lainnya, seperti izin tinggal bagi warga negara asing (WNA), juga dapat dilakukan.

"Kami menyiapkan 30 kuota permohonan paspor yang dapat

diakses melalui aplikasi M-Paspor. Pastikan lokasi pengajuannya di MPP Blora. Yang lebih spesial lagi, kami juga menyediakan kuota *walk-in* atau datang langsung untuk 30 orang pemohon paspor yang ber-KTP Kabupaten Blora. Harapannya, total 60 kuota dalam sehari bisa dimaksimalkan dengan baik," tambah Zaeni.

Sementara itu, Kepala DPMPSTP Kabupaten Blora Bondan Arsiyanti menyambut baik kehadiran layanan

keimigrasian di MPP Kabupaten Blora. Arsiyanti berharap masyarakat dapat memanfaatkan kemudahan akses layanan keimigrasian dengan sebaik-baiknya.

"Kami pemangku kebijakan di Kabupaten Blora berterima kasih kepada Kantor Imigrasi Pati atas kehadirannya di MPP Blora. Kami harap ini bisa menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan keimigrasian," tutup Arsiyanti. ■

Petugas mengambil data biometrik pemohon paspor di MPP Blora. (Foto: Brian Panji)



Gencarkan Penegakan Hukum Keimigrasian, **16 BURON DPO INTERNASIONAL DITANGKAP PADA 2024**

Ditjen Imigrasi menangkal masuk puluhan ribu WNA ke Indonesia dan menangkap 16 buron Interpol. Angka penegakan hukum keimigrasian melonjak hingga ratusan persen sepanjang 2024.

■ Penulis: Elyan Nadian Zahara



Penangkapan WN RRT yang menjadi buron DPO
(Foto: Dok. Ditjen Imigrasi)

Sepanjang 2024, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi berhasil meringkus 16 buronan dalam daftar pencarian orang (DPO) Interpol. Buron terakhir yang ditangkap pada 2024 adalah YZ, bagian sindikat judi *online* (judol) asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Sebelumnya, Ditjen Imigrasi juga menangkap sejumlah warga negara asing (WNA) pelaku tindak pidana penipuan, pencucian uang, dan narkoba.

Pada tahun yang sama, Imigrasi menetapkan 130 WNA sebagai tersangka tindak pidana keimigrasian. Angka ini melonjak 145,2% dibandingkan 2023 dengan jumlah 53 tersangka. Imigrasi juga mengenakan tindakan administratif keimigrasian (TAK) terhadap 5.434 WNA. Jumlah ini naik 98,7% dibandingkan 2023 dengan jumlah TAK mencapai 2.734 orang. Sementara itu, sebanyak 10.583 orang ditangkal masuk ke Indonesia, naik 58% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 6.673 WNA.

“Meningkatnya mobilitas orang asing harus kami sikapi dengan kewaspadaan yang lebih tinggi terhadap aktivitas mereka. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan keamanan dan ketertiban di Indonesia,” jelas Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan (Imipas) Agus Andrianto.

Pejabat imigrasi berwenang untuk melakukan TAK terhadap WNA di wilayah Indonesia yang terbukti melakukan kegiatan berbahaya atau diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum. TAK juga dapat dikenakan kepada WNA yang tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Bentuk TAK yang dapat diberikan beragam, mulai dari pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan; pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal; hingga larangan berada di wilayah tertentu Indonesia. Selain itu, Imigrasi juga berhak memberlakukan keharusan bertempat tinggal di lokasi tertentu, memberikan biaya beban, serta yang paling berat itu adalah melakukan tindakan deportasi.

Sebagai bagian dari upaya pengawasan, Ditjen Imigrasi telah melaksanakan operasi pengawasan skala nasional secara berkala pada Mei,



Proses interogasi terhadap WNA berstatus DPO oleh tim Direktorat Jenderal Imigrasi (Foto: Dok. Ditjen Imigrasi)

Juli, dan September 2024. Operasi ini bertujuan memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan WNA di seluruh wilayah Indonesia.

Pengesahan perubahan Undang-Undang Keimigrasian pada 19 September 2024 turut memperkuat landasan penegakan hukum

“MENINGKATNYA MOBILITAS ORANG ASING HARUS KAMI SIKAPI DENGAN KEWASPADAAN YANG LEBIH TINGGI TERHADAP AKTIVITAS MEREKA. HAL INI PERLU DILAKUKAN UNTUK MEMASTIKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI INDONESIA.”

keimigrasian di Indonesia. Kini, WNA pelaku kejahatan di Indonesia dapat ditangkal masuk hingga 10 tahun atau seumur hidup. Sebelumnya, jangka waktu penangkalan adalah 6 bulan dan dapat diperpanjang. Selain itu, dengan perubahan UU Keimigrasian, seseorang yang sudah selesai menjalani tahap penyidikan dan memasuki tahap tuntutan jaksa dapat dicegah keluar wilayah Indonesia. Perubahan aturan ini menyesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-IX/2011.

“Pada tahun 2025 ini, saya instruksikan kepada semua jajaran untuk menggiatkan operasi secara berkala, memperkuat sinergisitas dengan APH (aparatus penegak hukum) lain. Jangan beri celah [kepada] orang asing untuk berulah, apalagi melakukan tindak kriminal di negara kita,” tutup Agus. ■

Dua WNA Pengunggah Video Konten Negatif Diamankan: **IMIGRASI LAKUKAN KONFIRMASI DAN PEMERIKSAAN**

Beberapa waktu lalu, video negatif mengenai petugas imigrasi viral di masyarakat. Menanggapi hal ini, Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan pencarian fakta dengan memeriksa orang asing dan petugas yang terlibat.

■ Penulis: Ajeng Rahma Safitri

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi berhasil mengamankan dua warga negara (WN) Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang terlibat dalam penyebaran video negatif mengenai petugas di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Warga negara asing (WNA) berinisial LB dan LJ tersebut berada di ruang detensi Direktorat Jenderal Imigrasi untuk dipulangkan ke negara mereka.

"Setelah viralnya konten dari akun TikTok @stellaropectics888 pada 17 Januari 2025, pihak Direktorat Jenderal Imigrasi langsung melakukan langkah pemeriksaan internal dan CCTV bandara secara *real time*, mulai dari kedatangan WNA yang bersangkutan sampai dengan keluar dari area pemeriksaan keimigrasian. Berdasarkan rekaman CCTV, tidak ditemukan bukti pemberian dan penerimaan uang. Dari hasil pemeriksaan, tidak ada pengakuan dari anggota tentang menerima sejumlah uang," tutur Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Saffar M. Godam pada Rabu (22/1).

Sebelumnya, pada Senin (20/1), muncul konten video dari akun media sosial yang sama (@stellaropectics888) berisi permintaan maaf dari WNA pemilik akun tersebut. Di dalam video itu, ia juga menyatakan apa yang disampaikan dalam video sebelumnya tidak benar. Sementara itu, uang sejumlah Rp500.000 yang dibawa oleh WNA digunakan untuk membayar biaya *visa on arrival* (VoA).

Namun demikian, Imigrasi tetap melakukan klarifikasi secara langsung kepada LB dan LJ tentang pernyataan

di dalam konten video tersebut. Dari hasil klarifikasi, kedua WNA tetap memberikan pernyataan yang sama sesuai dengan konten video kedua yang

mereka unggah.

Saat LB dan LJ tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, petugas imigrasi mendapati bahwa keduanya salah jalur (melalui jalur untuk penumpang prioritas via area keberangkatan). Setelah itu, petugas membawa mereka ke area kedatangan internasional agar melakukan proses keimigrasian. Seluruh kejadian tersebut terekam di kamera CCTV bandara.

"Atas perbuatan mereka, LB dan LJ akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," imbuh Godam.

Menteri Imigrasi dan Pemasyrakatan Agus Andrianto menyampaikan komitmen untuk memastikan integritas dan akuntabilitas dalam setiap layanan publik. "Imigrasi terus melakukan pengawasan internal yang ketat. Apabila ada petugas yang terbukti melanggar aturan, tindakan tegas akan diambil sesuai peraturan perundang-undangan," tegas Agus. ■

Penangkapan WN RRT yang menyebarkan video penyuhan pungli petugas imigrasi (Foto: Dok. Ditjen Imigrasi)



WN Tanzania dideportasi Rudenim Denpasar. (Foto: Dok. Rudenim Denpasar)



Langgar Hukum Keimigrasian, **TIGA WNA DIDEPORTASI DARI BALI**

Karena menyalahgunakan izin tinggal hingga mengganggu keamanan dan ketertiban, tiga WNA dikenakan sanksi deportasi. Ketiganya dikembalikan paksa ke negara masing-masing pada 3 Januari 2025.

■ Penulis: Reza Ashuri

Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar mendeportasi tiga warga negara asing (WNA) asal Tanzania (JPH), Norwegia (HAGFB), dan Aljazair (MM). JPH, HAGFB, dan MM terbukti melanggar ketentuan hukum keimigrasian. Ketiganya dideportasi ke negara masing-masing melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, pada 3 Januari 2025.

JPH, wanita kelahiran 1999, tiba di Indonesia pada 1 April 2024 dengan

menggunakan izin tinggal kunjungan. Ia kemudian memperbarui izin tinggalnya menjadi izin tinggal terbatas (ITAS) investor. Namun, saat dilakukan pemeriksaan, JPH tidak dapat memberikan informasi yang jelas terkait investasinya di sebuah perusahaan sehingga izin tinggalnya dibatalkan. JPH terbukti melanggar Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Sementara itu, HAGFB datang ke Indonesia dengan menggunakan *visa on*

arrival (VoA). Ia terbukti mengganggu keamanan dan ketertiban di sebuah kafe di Ubud. HAGFB menolak meninggalkan kafe karena masalah finansial dan berencana menjual pakaiannya secara ilegal. Kasus ini dilaporkan ke Polsek Ubud dan diteruskan ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar.

Sementara itu, MM tiba di Indonesia pada 2022 dengan menggunakan izin tinggal sementara (ITAS) untuk tujuan bisnis. Namun, saat petugas melakukan pengecekan lapangan, perusahaan yang didaftarkan tidak dapat ditemukan di alamat yang tercantum. Selain itu, MM juga berbisnis kafe di Nusa Ceningan, Bali, yang tidak sesuai dengan dokumen investasi. MM terbukti melanggar Pasal 75 UU No. 6 Tahun 2011.

Kepala Rudenim Denpasar Gede Dudy Duwita menjelaskan bahwa penangkalan terhadap WNA dapat diberlakukan hingga enam bulan dan dapat diperpanjang. Penangkalan seumur hidup bahkan dapat diberlakukan untuk WNA yang mengancam keamanan dan ketertiban umum. Keputusan akhir mengenai penangkalan ini diputuskan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi.

Dudy mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap orang asing di Indonesia. Ia berharap dapat menjaga ketertiban dan keamanan di Bali serta memastikan setiap WNA mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia. ■

Salah Gunakan Izin Tinggal, 17 WN Vietnam Diamankan

Tujuh belas warga negara (WN) Vietnam diamankan Imigrasi dari sebuah klinik bedah kecantikan di Pluit Timur, Jakarta Utara pada Minggu (5/1). Klinik ini telah beroperasi sejak 2018.

“Berawal dari informasi masyarakat mengenai aktivitas warga negara asing (WNA) yang bekerja di klinik tersebut, petugas kami kemudian melakukan pengawasan tertutup dengan menyamar sebagai pelanggan,” jelas Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Yuldi Yusman saat konferensi pers di Gedung Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kamis (10/1).

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Saffar M. Godam menjelaskan, “Setelah investigasi ke lokasi, kami mendapati bahwa ternyata WNA yang bekerja di klinik tersebut bukan hanya dokter dan tenaga medis lainnya, melainkan juga staf pemasaran dan penerima tamu. Keseluruhannya ada 17 orang.”

Para WN Vietnam tersebut terdiri atas 10 perempuan dan 7 laki-laki. Sebanyak 15 orang di antaranya masuk ke Indonesia menggunakan *visa on arrival* dan 2 orang lainnya menggunakan izin tinggal terbatas (ITAS) investor. Saat ini, mereka berada di Gedung Direktorat

Jenderal Imigrasi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Mereka diduga menyalahgunakan izin tinggal dan terancam Pasal 122 Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2011 yang mengatur pengenaan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000.

“Kami sedang melakukan pengembangan terhadap kasus ini untuk mengungkap apakah ada pihak lain yang terlibat, seperti penyalur atau penampung WNA tersebut. Tidak ada toleransi bagi pelanggaran hukum di Indonesia,” tutup Godam. ■

Penulis: Elyan Nadian Zahara



Konferensi pers penangkapan 17 WN Vietnam yang menyalahgunakan izin tinggal (Foto: Aditja Pratama Gegana Uwen)



Imigrasi Belawan mendeportasi WN Nigeria yang diduga terlibat penipuan. (Foto: Dok. Kanim Belawan)

Al-Muqsith, Cisarua, Bogor, menjadi marak di media sosial.

“Berdasarkan keterangan dari pihak DKM (Dewan Kemakmuran Masjid) Al-Muqsith, kejadian bermula ketika MA tidak mengindahkan peringatan dari petugas DKM untuk melepaskan alas kaki ketika memasuki area batas suci sehingga terjadi keributan sampai dengan pemukulan terhadap Saudara Rohmat, marbot Masjid Al-Muqsith. Kejadian tersebut terbukti dari rekaman CCTV.”

Berdasarkan hasil pemeriksaan, MA diketahui tinggal lajak (*overstay*) sejak 8 Januari 2025. Ia masuk ke

Imigrasi Berhasil Tangkap WNA Buron Pelaku Kekerasan

Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Bogor menangkap MA (39), WN Arab Saudi pelaku pemukulan seorang marbot masjid pada Minggu (12/1). Setelah sempat menjadi buron, MA berhasil ditangkap oleh tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Bogor yang bekerja sama dengan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di sebuah vila di Cisarua, Bogor, pada Selasa (14/1).

Sebelumnya, kekerasan yang dilakukan MA terhadap petugas Masjid

Indonesia menggunakan *visa on arrival* pada 10 Desember 2024.

“MA melanggar Pasal 78 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tentang *overstay* sehingga dapat dikenakan sanksi denda sebesar Rp1.000.000 per hari. Ia juga melanggar Pasal 75 UU Keimigrasian karena telah mengganggu keamanan dan ketertiban,” tutur Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Yuldi Yusman dalam konferensi pers, Jumat (17/1). ■

Penulis: Ajeng Rahma Safitri

Selundupkan PMI Ilegal, Kapten Kapal WNI Ditangkap

Kantor Imigrasi Belawan melakukan pemeriksaan intensif kepada 1 (40) dan menetapkannya sebagai tersangka kasus penyelundupan manusia. Surat Perintah Penyidikan telah diterbitkan pada Selasa (21/1), menyusul dugaan kuat tindak pidana keimigrasian.

Kepala Kantor Imigrasi Belawan Andriw Guntur S. Simanjuntak menjelaskan bahwa 1, kapten kapal berkewarganegaraan Indonesia, diduga menjemput delapan pekerja migran Indonesia (PMI) dari kapal Malaysia. Kedelapan PMI tersebut kemudian dibawa ke Indonesia melalui jalur laut secara ilegal. Mereka diidentifikasi

sebagai korban penyelundupan manusia. Atas tindakannya, 1 dijerat dengan Pasal 120 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dan menyita barang bukti. Kasus ini akan terus dikembangkan untuk mengungkap pihak lain yang terlibat. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sumatra Utara (Sumut) Theodorus Simarmata menegaskan komitmen Imigrasi Sumut dalam penegakan hukum. Imigrasi akan terus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara. ■ Penulis: Ardian P. Putro

Diduga Terlibat Penipuan Daring, WNA Asal Nigeria Dideportasi

Pria Nigeria berinisial JE (34) dideportasi oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan. JE dinilai telah menyalahgunakan izin tinggal dan berpotensi melakukan tindak penipuan secara daring.

Kasus bermula pada Sabtu (18/1) saat tim Inteldakim Kantor Imigrasi Belawan mendapat laporan masyarakat mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing yang meresahkan. Tim kemudian melakukan pengecekan ke lapangan dan mendapati bahwa keberadaan dan kegiatan JE tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki. JE kemudian diamankan ke Kantor Imigrasi Belawan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Selain itu, petugas menemukan beberapa akun media sosial pada sejumlah gawai milik JE. Akun-akun tersebut diduga akan digunakan untuk melakukan penipuan bermodus jual beli barang dari luar negeri dengan menasar warga negara Indonesia (WNI), khususnya perempuan.

Kepala Seksi Inteldakim Kantor Imigrasi Belawan Deki Melwanda mengungkapkan, “JE akan dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan dicantumkan ke dalam daftar tanggal.”

Dengan pengawalan petugas, JE dideportasi kembali ke negara asalnya melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Kamis (6/2). ■

Penulis: Muhammad Taufik



Petugas datangkan WNA Arab Saudi yang diduga memukul marbot masjid di Bogor. (Sumber: antarafoto.com)

IMMIGRATION LOUNGE KINI HADIR DI DEPOK DAN SURABAYA

Dengan lokasi yang strategis, Immigration Lounge memudahkan masyarakat mengurus dokumen keimigrasian. Kini, Immigration Lounge kini hadir di Ciputra World Surabaya dan Pesona Square Mall Depok.

■ Penulis: Elyan Nadian Zahara

Setelah sebelumnya hadir di sejumlah kantor imigrasi di wilayah Jakarta, Gresik, dan Bekasi, Immigration Lounge kini hadir di Ciputra World Surabaya serta Pesona Square Mall Depok. Dalam peresmian Immigration Lounge di Ciputra World Surabaya pada Kamis (16/1) lalu, Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Saffar M. Godam menyebutkan bahwa fasilitas ini akan memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen keimigrasian tanpa harus datang ke kantor imigrasi.

Di Immigration Lounge yang merupakan unit kerja keimigrasian ini, masyarakat (warga negara Indonesia/WNI) bisa mengurus paspor setiap hari

(Senin s.d. Minggu) dengan layanan paspor percepatan satu hari selesai. Selain itu, Immigration Lounge juga memberikan layanan perpanjangan izin tinggal bagi orang asing (warga negara asing/WNA).

“Layanan keimigrasian yang diberikan di Immigration Lounge ini khusus untuk layanan paspor percepatan untuk WNI dan perpanjangan VoA (*visa on arrival*) untuk WNA, jadi layanannya lebih spesifik,” kata Godam.

Kepala Kantor Imigrasi (Kanim) Surabaya Ramdhani menambahkan bahwa kehadiran Immigration Lounge merupakan tonggak penting dalam upaya menjadikan Kantor Imigrasi

Surabaya sebagai pusat layanan keimigrasian unggulan di Indonesia.

Masyarakat yang akan mengurus paspor di Immigration Lounge bisa mendaftar terlebih dahulu melalui aplikasi M-Paspor. Tersedia 100 kuota pengurusan paspor setiap harinya.

Lima hari berselang, pada Selasa (21/1), Plt. Dirjen Imigrasi juga hadir dalam peresmian Immigration Lounge di Depok, yang berlokasi di lantai tiga Pesona Square Mall.

Godam menjelaskan bahwa Immigration Lounge di Pesona Square Mall merupakan yang kedua di Jawa Barat dan yang ketujuh secara nasional. Lounge ini menawarkan layanan paspor elektronik dan paspor percepatan satu hari selesai. Lokasinya yang strategis dan mudah diakses dari tol memudahkan masyarakat untuk memanfaatkan layanan ini.

“Seperti Immigration Lounge sebelumnya, kami berharap lounge ini juga memperoleh respons positif dari masyarakat,” ujar Godam.

Kepala Kantor Imigrasi Depok Irvan Triansyah berharap, kehadiran Immigration Lounge ini dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam menggunakan layanan keimigrasian. Selain itu, lounge ini juga dilengkapi dengan inovasi terbaru berupa *customer service artificial intelligence* (CSAI), yaitu asisten virtual untuk memberikan informasi dan membantu masyarakat dalam pelayanan keimigrasian.

Masyarakat yang ingin mengurus paspor di Immigration Lounge Pesona Square Mall dapat mendaftar melalui aplikasi M-Paspor. Lounge ini beroperasi setiap hari (Senin s.d. Minggu) pukul 10.00 s.d. 18.00 WIB, kecuali hari libur nasional. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui media sosial resmi Kantor Imigrasi Depok di Instagram @imigrasi_depok, X @kanimdepok, dan WhatsApp 0811-8255-891. ■

Kepala Kantor Imigrasi Depok mendampingi Plt. Dirjen Imigrasi dalam peresmian Immigration Lounge di Pesona Square Mall. (Foto: Aditja Pratama Gegana Uwen)



Kantor Imigrasi Surakarta mulai mengoperasikan ruangan layanan keimigrasian yang lebih luas dan terintegrasi sejak 2 Januari 2025. Ruang ini merupakan hasil renovasi selama 80 hari dari ruangan layanan paspor sebelumnya yang telah digunakan sejak 2015.

Kini, seluruh layanan keimigrasian di Kantor Imigrasi (Kanim) Surakarta menyatu dalam satu area. Sebelumnya, layanan-layanan ini tersebar di lantai 1 dan 2. Dengan adanya tata ruang baru ini, efisiensi dan kenyamanan bagi masyarakat diharapkan dapat meningkat.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kantor Imigrasi Surakarta Tri Siwi Andayani menjelaskan bahwa renovasi yang dilakukan merupakan jawaban atas tantangan keterbatasan ruangan layanan dalam mewujudkan pelayanan publik berkualitas. "Kantor Imigrasi Surakarta sebagai kanim kelas I hanya memiliki lahan seluas 2.173 m². Jadi, kami harus memaksimalkannya," tutur Siwi.

Lebih lanjut, Siwi menjelaskan bahwa setiap harinya sekitar 300 orang datang untuk menggunakan layanan keimigrasian. Oleh karena itu, kenyamanan menjadi syarat mutlak dalam mewujudkan pelayanan yang prima.

Terkait renovasi Kantor Imigrasi Surakarta, Kepala Subbagian Tata Usaha Danil Rachman menjelaskan bahwa renovasi dimulai sejak 11 Oktober 2024 dan rampung pada 31 Desember 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp951.425.754,90. Pembiayaan tersebut meliputi rehabilitasi ruang pelayanan lantai 1 serta pemeliharaan instalasi kantor untuk kegiatan pembangunan dan renovasi gedung dan bangunan.

Ruangan layanan keimigrasian Kantor Imigrasi Surakarta kini memiliki luas sekitar 545 m². Ruang tersebut terdiri atas ruang layanan paspor dan izin tinggal serta sejumlah fasilitas pendukung. Ruang layanan paspor dilengkapi dengan enam meja layanan reguler dan satu ruangan layanan prioritas bagi kaum rentan.

"Ruang prioritas dapat ditutup jika pemohon paspor menghendaki privasi untuk alasan tertentu, seperti harus membuka penutup wajah atau lebih nyaman jika tidak dilihat orang lain," papar Tri Siwi Andayani.

Di ruangan yang sama juga ditempatkan ruang pengambilan



Ruang layanan keimigrasian baru Kantor Imigrasi Surakarta (Foto: Dok. Kanim Surakarta)

Wujudkan Pelayanan Publik Berkualitas, **KANTOR IMIGRASI SURAKARTA BEROPERASI DENGAN RUANGAN BARU**

Kantor Imigrasi Surakarta merenovasi ruangan layanan keimigrasian. Peningkatan efektivitas, efisiensi, dan kenyamanan pelayanan jadi tujuan.

■ Penulis: Wakhid Aprizal Ma'ruf

paspor. Selain itu, sebagai fasilitas pendukung, disediakan ruang bermain anak, ruang laktasi, Wi-Fi gratis, toilet disabilitas, mesin cetak (*printer*), dan pengisi daya ponsel. Pengguna layanan juga dimanjakan dengan kopi dan teh panas, minuman dingin, dan makanan ringan yang tersedia secara gratis.

Tidak hanya itu, untuk memastikan ruangan sesuai dengan standar pelayanan ramah HAM, terdapat

jalan landai untuk mengakses pintu masuk serta tersedianya alat bantu kelompok rentan yang siap digunakan. Jalan antarruangan juga didesain tanpa perbedaan ketinggian guna memudahkan kelompok rentan.

"Kami berharap renovasi ruang layanan ini membuat keberlangsungan pelayanan keimigrasian makin efektif dan efisien, baik dalam waktu maupun penggunaan energi," tutup Siwi. ■

IMIGRASI BLITAR GELAR LAYANAN PASPOR SIMPATIK DI KAMPUNG COKLAT

Sebagai bagian dari perayaan Hari Bhakti Imigrasi ke-75, Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Blitar bekerja sama dengan Kampung Coklat untuk mengadakan kegiatan Paspur Simpatik. Selain dapat memperkenalkan wisata lokal, kegiatan ini juga membuat layanan keimigrasian lebih mudah dijangkau oleh masyarakat.

■ Penulis: Caesar Demas



Wisata Edukasi Kampung Coklat, Blitar (Sumber: tempatwisatasekitar.blogspot.com)

Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Blitar mengadakan kegiatan Paspur Simpatik di Kampung Coklat, Blitar pada Sabtu (11/1). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan Hari Bhakti Imigrasi ke-75. Selain pemrosesan 50 permohonan paspor, kegiatan ini juga diisi dengan donor darah.

Ini bukan kali pertama kegiatan Paspur Simpatik diadakan di Kampung Coklat. Sebelumnya, Kantor Imigrasi Blitar telah beberapa kali mengadakan pelayanan paspor di lokasi wisata ini melalui layanan inovasi Imigrasi Tiba untuk Anda (ISTANA). Pada 2024, ada tiga kegiatan ISTANA yang berlokasi di Kampung Coklat.

Pemilihan Kampung Coklat sebagai lokasi kegiatan Paspur Simpatik merupakan hasil sinergi dan kolaborasi

antara Kantor Imigrasi Blitar dan pengelola Kampung Coklat. Kedua pihak ingin mengenalkan potensi wisata lokal dan meningkatkan daya saing produk lokal di kancah internasional.

“Kegiatan Paspur Simpatik di Kampung Coklat merupakan inovasi pelayanan sebagai upaya mempertahankan predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) yang telah diraih sejak 2019. Kegiatan ini dilaksanakan secara berkesinambungan untuk saling mendukung dan meningkatkan kinerja antara Kantor Imigrasi Blitar dan Kampung Coklat,” ucap Arief Yudistira, Kepala Kantor Imigrasi Blitar.

Kampung Coklat merupakan wisata edukasi berbasis produk olahan coklat. Pengunjung dapat belajar

tentang budi daya kakao dan proses pengolahan coklat, serta menikmati berbagai produk olahan coklat khas Kampung Coklat. Sejak dibuka untuk umum pada 2014, Kampung Coklat memiliki visi untuk menjadi tempat wisata utama bertema coklat di Indonesia.

Sinergi dan kolaborasi antara Kantor Imigrasi Blitar dan Kampung Coklat diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak. Bagi Imigrasi, kegiatan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan paspor. Bagi Kampung Coklat, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan popularitas wisata dan produknya hingga ke mancanegara.

“Harapan saya ke depannya, semoga kegiatan ini tetap dapat dilaksanakan dan masyarakat ikut secara aktif. Kegiatan ini merupakan wujud nyata dan komitmen Kantor Imigrasi Blitar untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” ujar Letkol Inf. Hendra Sukmana, Komandan Kodim 0808 Blitar, salah satu pemohon paspor.

Sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak akan terus dilakukan untuk mewujudkan Imigrasi yang senantiasa melayani, mengabdikan, dan berinovasi, sesuai dengan tema Hari Bhakti Imigrasi ke-75. ■

Petugas imigrasi mengambil data biometrik pemohon paspor di layanan Paspur Simpatik. (Foto: Dok. Kanim Blitar)



Paspor Palsu Tidak Terdeteksi *Autogate*, **TIGA WN PAKISTAN DIAMANKAN IMIGRASI SOEKARNO-HATTA**

Tiga WN Pakistan diamankan petugas imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta setelah gagal memindai dokumen di *autogate*. Meski ada *autogate* untuk efisiensi, pengawasan keimigrasian tetap menjadi prioritas.

■ Penulis: Elyan Nadian Zahara

Tiga warga negara (WN) Pakistan berinisial SZ, TS, dan MZ yang mencoba memasuki wilayah Indonesia dengan menggunakan dokumen perjalanan palsu berhasil digagalkan oleh petugas imigrasi. Ketiga WN Pakistan tersebut mencoba masuk ke Indonesia dengan menggunakan paspor Prancis dan kartu identitas palsu pada Rabu (12/2) sekitar pukul 16.30 WIB di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang.

"Mereka ketiga tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta menggunakan pesawat Thai Airways dari Bangkok. Karena pakai paspor Prancis, mereka sempat mengurus visa on arrival dan mencoba melewati pemeriksaan imigrasi melalui mesin *autogate*. Namun, paspor mereka tidak terdeteksi," jelas Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Dirwasdakim) Yuldi Yusman.

Petugas imigrasi yang curiga lalu melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian diketahui bahwa ketiga pelaku menggunakan paspor Pakistan saat terbang dari Bangkok menuju Indonesia. Petugas juga menemukan tiga paspor Pakistan milik mereka. Mereka baru menggunakan paspor Prancis ketika hendak masuk ke Indonesia.

Berdasarkan bukti awal tersebut, petugas imigrasi kemudian menyerahkan penanganan ini kepada penyidik pada Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta.

"Kami sedang melakukan pendalaman apakah ada pihak-pihak lain yang terlibat. Sejauh ini indikasinya adalah motif ekonomi, [yaitu] untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negara lain," sambung Yuldi.

Dari hasil penyelidikan lebih lanjut, diketahui bahwa SZ, TS, dan MZ bertujuan ke Eropa. Mereka



Salah seorang WN Pakistan pengguna paspor palsu (Foto: Dok. Humas Ditjen Imigrasi)

memperoleh paspor Prancis palsu dari seorang WN Sri Lanka berinisial WJ yang mereka kenal melalui media sosial Facebook. Mereka sepakat untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan.

WJ menyarankan agar mereka agar melakukan perjalanan ke Indonesia terlebih dahulu sebelum berangkat ke Eropa. Mereka juga diminta untuk menggunakan paspor Pakistan pada saat berangkat dari Thailand dan menggantinya dengan dokumen perjalanan Prancis saat tiba di Indonesia.

Saat ini, SZ, TS, dan MZ sedang dalam proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana keimigrasian. Mereka dijerat dengan Pasal 119 ayat (2) Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian karena sengaja menggunakan dokumen perjalanan palsu dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000.

Terkait kasus ini, Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Agus Andrianto menjelaskan bahwa Imigrasi melakukan pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing (WNA) baik sebelum kedatangan maupun selama berada di Indonesia. Meskipun *autogate* hadir untuk pemeriksaan imigrasi yang lebih efisien, aspek pengawasan keimigrasian tetap menjadi prioritas.

"Untuk mencegah potensi ancaman terhadap keamanan nasional, seperti terorisme, kejahatan transnasional, atau imigrasi ilegal, WNA yang datang dengan maksud tidak baik dan cara yang nonprosedural akan menjadi sasaran utama pengawasan Imigrasi," tutup Agus. ■

Konferensi pers penangkapan 3 WN Pakistan pengguna paspor palsu (Foto: Dok. Humas Ditjen Imigrasi)



Oase di Kala Efisiensi:

IMIGRASI BOYONG TROFI PRIA 2025

Tim Humas Ditjen Imigrasi meraih juara dalam empat kategori pada gelaran PRIA 2025. Acara ini menjadi wadah untuk berbagi inspirasi dan evaluasi mengenai praktik-praktik komunikasi di berbagai sektor.

■ Penulis: Elyan Nadian Zahara

Wajah Ketua Tim Humas Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Achmad Nur Saleh malam itu bungah saat memenuhi panggilan juri untuk menerima trofi. Pada gelaran Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2025 yang diselenggarakan di Graha

Pos Indonesia, Bandung, Rabu (26/2), Ditjen Imigrasi berhasil meraih trofi Platinum (pemenang dengan trofi terbanyak) pada sektor kementerian/ lembaga dengan memboyong tiga medali emas dan satu medali perak.

Kali ini, Imigrasi menggantikan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian

Keuangan yang memenangkan trofi Platinum tahun 2024 pada sektor yang sama.

"Kami sangat berterima kasih atas apresiasi [yang] luar biasa ini, terutama untuk trofi Platinum yang tidak kami sangka-sangka. Tiga *gold medal* untuk kategori Instagram, *Website*, dan *Owned Media*, serta *silver medal* untuk TikTok alhamdulillah berhasil kami bawa pulang dan menjadi oase di tengah kondisi efisiensi saat ini," ujar Achmad.

PRIA merupakan ajang kompetisi bergengsi yang menilai kinerja kehumasan (*public relations/PR*) di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perusahaan swasta nasional dan multinasional, BUMN, anak usaha BUMN, BUMD, hingga perguruan tinggi.

Tahun 2025 merupakan tahun kesepuluh penyelenggaraan PRIA. Dalam kompetisi kali ini, sejumlah kategori yang dibuka di antaranya *Owned Media*, Kanal Digital, Manajemen Krisis, Laporan Tahunan, Program PR, Departemen PR, hingga Komunikasi SR (Stimulus-Respons).

Selain itu, PRIA 2025 ini juga memperkenalkan dua kategori baru, yaitu PR Agency of the Year yang khusus dipersembahkan bagi agensi PR, dan Lifetime Achievement of the Year untuk individu yang telah memberikan kontribusi luar biasa bagi industri komunikasi.

Untuk menilai karya seluruh peserta, diterjunkan 18 juri kaliber nasional yang kompeten di bidangnya masing-masing. "PRIA bukan sekadar wadah [untuk] unjuk praktik komunikasi terbaik, melainkan juga menjadi tempat saling belajar dan evaluasi konstruktif mengenai praktik-praktik komunikasi [di] instansi maupun korporasi," ujar salah satu juri.

Kompetisi ini tidak semata-mata memperjuangkan siapa yang lebih baik. Lebih dari itu, PRIA menjadi ruang bertumbuh dan inspirasi bagi setiap PR untuk Indonesia pada masa depan, sebagaimana tema sentral yang diusung, "Satu Dekade PRIA 2025". ■

Achmad Nur Saleh saat mewakili Humas Ditjen Imigrasi pada malam penganugerahan PRIA 2025 (Foto: Putu Maha P.)



Layanan Paspor



Syarat

1. Kartu tanda penduduk (KTP)
2. Kartu keluarga (KK)
3. Akta kelahiran/akta perkawinan/buku nikah/ijazah/surat baptis

Biaya

Pelayanan percepatan paspor	Rp1.000.000
Paspor nonelektronik masa berlaku 5 tahun	Rp350.000
Paspor nonelektronik masa berlaku 10 tahun	Rp650.000
Paspor elektronik masa berlaku 5 tahun	Rp650.000
Paspor elektronik masa berlaku 10 tahun	Rp950.000

Prosedur

1. Datang langsung ke kantor imigrasi tanpa melalui aplikasi M-Paspor maksimal pukul 10 pagi.
2. Isi formulir permohonan paspor serta lampirkan dokumen persyaratan.
3. Serahkan berkas permohonan paspor untuk diperiksa oleh petugas imigrasi.
4. Tunggu berkas permohonan diinput oleh petugas imigrasi.
5. Ikuti proses foto dan wawancara.
6. Lakukan pembayaran di bank.
7. Dapatkan paspor yang telah diterbitkan.

Silakan **hubungi kantor imigrasi** terdekat untuk informasi lebih lanjut

Pilih Visa Sesuai Durasi Tinggal: **BEBAS VISA KUNJUNGAN ATAU VISA ON ARRIVAL**

Warga negara asing asal 13 negara bisa memilih dua jenis visa untuk kunjungan wisata atau kunjungan keluarga mereka ke Indonesia. Durasi tinggal menjadi pertimbangan utama.

■ Penulis:Putu Maha Permana Aditya

Dua jenis visa kunjungan disediakan pemerintah Indonesia untuk warga negara asing asal beberapa negara yang ingin mengunjungi Indonesia dengan tujuan wisata atau kunjungan keluarga. Kedua jenis visa itu adalah bebas visa kunjungan (BVK) dan *visa on arrival* (VoA) yang memiliki durasi tinggal berbeda.

Perbedaan BVK dan VoA

BVK adalah fasilitas yang memungkinkan warga negara asing dari 13 negara untuk masuk ke Indonesia tanpa perlu mengajukan visa sebelum keberangkatan. Ketiga belas negara tersebut adalah Brunei Darussalam, Filipina, Laos, Kamboja, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Vietnam, Timor-Leste, Kolombia, Hong Kong, dan Suriname. Masa tinggal maksimal dengan visa ini adalah 30 hari dan tidak dapat diperpanjang.

Sementara itu, VoA adalah jenis visa yang dapat diurus sebelum kedatangan (e-VoA) atau diperoleh saat tiba di bandara maupun pelabuhan internasional di Indonesia. VoA memungkinkan masa tinggal yang lebih lama dibandingkan BVK, yaitu 30 hari, dan dapat diperpanjang sekali untuk 30 hari berikutnya sehingga total masa tinggal menggunakan visa ini bisa mencapai 60 hari.

Untuk memperoleh VoA, warga negara asing akan dikenakan biaya sebesar Rp500.000. Jumlah ini juga berlaku saat perpanjangan VoA untuk 30 hari berikutnya. Perpanjangan VoA dapat dilakukan secara daring (untuk e-VoA) atau dengan datang langsung ke kantor imigrasi (untuk VoA jenis stiker).

Pertimbangan Memilih Visa

Pertimbangan utama dalam memilih antara BVK dan VoA adalah durasi

tinggal yang diinginkan. Lebih praktis bagi WNA dari negara dalam daftar subjek BVK yang berencana tinggal kurang dari 30 hari untuk menggunakan BVK. Sementara itu, jika ingin tinggal lebih dari 30 hari atau berencana untuk memperpanjang masa tinggal, VoA adalah opsi yang lebih sesuai.

Khusus untuk warga negara yang termasuk dalam daftar subjek BVK dan berencana tinggal lebih dari 30 hari di Indonesia, tersedia opsi untuk mengajukan VoA saat kedatangan. Dengan demikian, mereka tidak perlu keluar dari Indonesia untuk mengajukan visa baru saat ingin memperpanjang masa tinggalnya.

Saat ini, terdapat 97 negara yang warganya dapat menggunakan fasilitas VoA, termasuk negara-negara dalam daftar subjek BVK. Daftar lengkap negara subjek VoA dapat dilihat di situs web Direktorat Jenderal Imigrasi. ■



Sekarang Masa Berlaku Paspor Sudah 10 Tahun!



Direktorat Tempat Pemeriksaan HARAPAN UNTUK OPTIMALISASI TPI

Direktorat TPI diharapkan dapat menghadapi tantangan besar keimigrasian. Sebagai penanggung jawab pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan TPI, direktorat ini akan membawahi 168 TPI yang tersebar di seluruh Indonesia.

■ Penulis: Junaidul Fitriyono (Alumnus Magister Manajemen dan Kebijakan Publik UGM)

Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan No. 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan telah menjadi dasar hukum pembentukan Direktorat Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Direktorat ini berada di bawah struktur Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Petugas imigrasi membantu seorang anak melewati autogate di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (ilustrasi) (Foto: Habil Ashari)



(Imipas). Kehadiran direktorat ini sangat dibutuhkan untuk mendukung fungsi keimigrasian, yakni pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, pengamanan negara, dan pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai penanggung jawab pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan TPI, direktorat ini akan membawahi 168 TPI yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebanyak 168 TPI tersebut terdiri atas 17 TPI udara pada bandara internasional, 95 TPI laut, 16 pos lintas batas internasional, dan 40 pos lintas batas tradisional (PLBT). Jumlah TPI yang banyak ini diharapkan dapat membantu menghadapi tantangan besar keimigrasian, yaitu memastikan lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia dapat dikelola dengan baik.

Pelayanan Keimigrasian

Pemeriksaan keimigrasian yang dilakukan oleh petugas di TPI merupakan salah satu bentuk pelayanan keimigrasian yang sangat penting. Pemeriksaan keimigrasian ini menjadi salah satu representasi pelayanan di Indonesia. Oleh karena itu, kualitas layanan, ketersediaan sarana pendukung, manajemen sumber daya manusia, dan penerapan prosedur yang jelas serta transparan harus mendapatkan perhatian serius.

Sebagai garis terakhir dalam memberikan izin masuk atau keluar wilayah Indonesia, TPI memiliki peran yang sangat vital untuk memastikan pelayanan tidak terhambat, baik karena kondisi alam maupun dukungan fasilitas. Kualitas layanan harus tetap sama baiknya di TPI laut, darat, maupun udara.

Penegakan Hukum

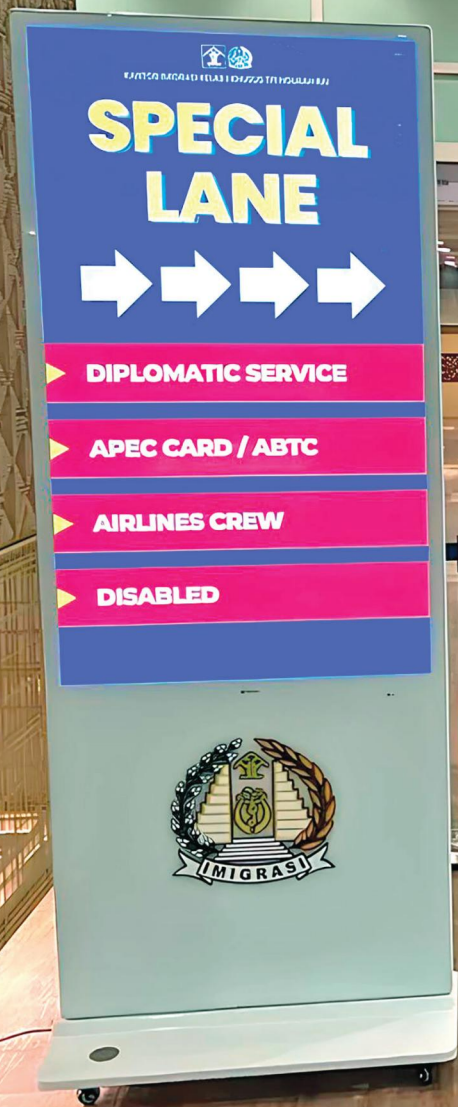
Beberapa bulan lalu, kita mendengar kisah kesuksesan rekan-rekan petugas imigrasi yang bekerja di perbatasan, salah satunya terkait penangkapan orang dalam daftar pencarian orang (DPO) yang hendak melakukan perlintasan ke luar negeri. Contoh ini menjadi salah satu bukti pentingnya pengelolaan TPI dari aspek pengawasan dan penegakan hukum. Fungsi keimigrasian ini tentunya tidak dapat berjalan dengan baik jika petugas tidak dibekali dengan pemahaman dan penerapan prosedur yang telah ditetapkan.

Upaya preventif harus terus dilakukan karena TPI merupakan ujung tombak pemeriksaan orang yang masuk dan meninggalkan wilayah Indonesia. Penghormatan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia harus dilakukan tidak hanya oleh warga negara Indonesia (WNI), tetapi juga warga negara asing (WNA) yang masuk dan beraktivitas di Indonesia.

Pengamanan Negara

Direktorat TPI memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung dan memastikan keamanan negara dari perlintasan orang di perbatasan laut,

UPAYA PREVENTIF HARUS TERUS DILAKUKAN KARENA TPI MERUPAKAN UJUNG TOMBAK PEMERIKSAAN ORANG YANG MASUK DAN MENINGGALKAN WILAYAH INDONESIA.



Tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai (Foto: Arif Rahman Suryaman)

darat, dan udara wilayah Indonesia. Imigrasi berperan dalam mencegah terjadinya isu keamanan negara, seperti terorisme, kejahatan trans-nasional, perdagangan manusia, penyelundupan, dan pengedaran gelap narkoba. Pelayanan keimigrasian yang bertumpu pada prosedur yang tepat dan tidak mengurangi tingkat kewaspadaan harus menjadi salah satu fokus pengelolaan TPI.

Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat

Salah satu peran penting Direktorat TPI adalah mendukung pembangunan dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam peran ini, Direktorat TPI harus memastikan pemerataan pembangunan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

Seperti yang telah diketahui, kesenjangan pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu isu yang harus ditangani dalam pemenuhan Asta Cita Presiden

Prabowo. Oleh karena itu, program dan rencana aksi Direktorat TPI harus memastikan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan dapat tercapai.

Tantangan Keimigrasian

Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Saffar M. Godam menegaskan bahwa tujuan utama pembentukan Direktorat TPI adalah untuk memastikan kegiatan pemeriksaan keimigrasian di seluruh Indonesia berjalan dengan tertib, efektif, dan efisien. Sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang selama ini menjadi kendala seharusnya dapat dipangkas dengan kehadiran direktorat ini. Fasilitas penunjang perlu mendapatkan perhatian yang serius untuk memastikan akurasi dan efektivitas data perlintasan. Selain itu, penempatan petugas yang memiliki pemahaman dan kesiapan dalam pemeriksaan keimigrasian di TPI juga harus menjadi sorotan.

Isu lain yang perlu mendapat perhatian adalah usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan perlintasan pada jalur yang sudah ditetapkan. Sebab, memasuki suatu wilayah kedaulatan negara secara tidak resmi akan menimbulkan sanksi hukum. Direktorat TPI memiliki tantangan dalam penanganan isu ini. Bersama-sama dengan pemangku kepentingan lainnya, Direktorat TPI juga menutup celah adanya perlintasan ilegal untuk masuk dan keluar wilayah kedaulatan Republik Indonesia.

Berbagai inovasi dapat dikembangkan untuk memberikan pengalaman perlintasan yang makin cepat dan efektif bagi masyarakat. Langkah cepat perlu terus dilakukan untuk memastikan pelaksanaan fungsi keimigrasian di TPI dapat berjalan dengan baik. Hal ini pada akhirnya akan mendorong pencapaian berbagai agenda strategis bangsa menuju Indonesia Emas 2045. ■

Ancaman *Face Morph*: **TANTANGAN UNTUK KEAMANAN PERBATASAN DAN IMIGRASI**

Ancaman *face morph* dapat terjadi di Imigrasi Indonesia yang menerapkan teknologi *face recognition*. Terdapat beberapa metode alternatif untuk mencegah risiko *face morph* yang telah diterapkan beberapa negara Eropa.

■ Penulis: Rezza Fauzy Sucipto

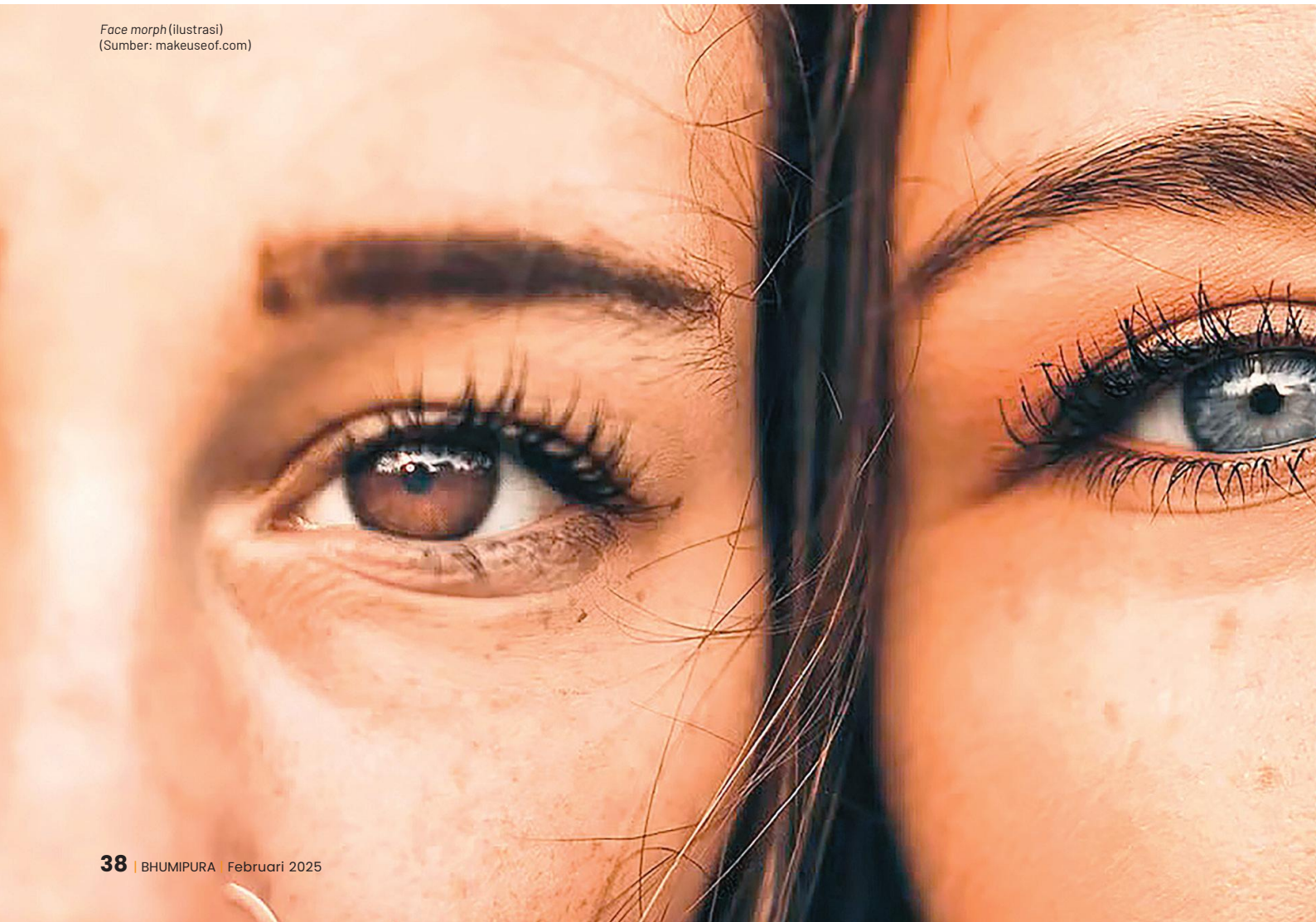
ICAO atau International Civil Aviation Organization (Organisasi Penerbangan Sipil Internasional) menggelar 19th Symposium on the ICAO Traveller Identification Programme pada 13–15 November 2024 di Montreal, Kanada. Konferensi ini secara khusus membahas secara mendalam mengenai ancaman *face morph* dan upaya peningkatan teknologi serta prosedur keamanan untuk memitigasi risiko tersebut.

Face morph merupakan metode manipulasi wajah. Cara kerjanya yaitu dengan menggabungkan dua atau lebih foto wajah untuk menghasilkan foto baru yang secara visual menyerupai foto-foto yang berkontribusi. Metode ini dapat digunakan untuk memalsukan identitas. Misalnya, *face morph* digunakan untuk mengelabui teknologi *face recognition* saat pembuatan paspor maupun saat melalui *autogate* di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI).

Face morph dapat dilakukan apabila proses permohonan paspor di suatu negara memungkinkan pemohon untuk mengunggah secara mandiri foto yang akan dicantumkan pada dokumen perjalanan. Biasanya, pengunggahan foto secara mandiri dilakukan melalui situs web ataupun aplikasi ponsel pintar (*smartphone*) yang telah disediakan.

Proses penggabungan foto *face morph* dapat dibuat dengan bantuan perangkat lunak yang saat ini banyak

Face morph (ilustrasi)
(Sumber: makeuseof.com)



tersedia di luaran. Penggabungan ini pun dapat dilakukan secara otomatis dan manual. Beberapa perangkat lunak yang dapat digunakan di antaranya Adobe Photoshop, Adobe After Effects, Abrosoft FantaMorph, Morph Thing, Morpheus Photo Morpher, Luxand FaceMorpher, Win Morph, dan lain-lain.

Face Morph dalam Keimigrasian

Semenjak dikemukakan pertama kali oleh Mateo Ferrara, seorang *associate professor* di Departemen Ilmu Komputer dan Teknik, Universitas Bologna dalam penelitiannya yang berjudul “*The Magic Passport*” (2014), *face morph* menjadi perbincangan dan perhatian otoritas imigrasi dan perbatasan, asosiasi industri *face recognition*, akademisi dan peneliti, serta otoritas lain yang menggunakan biometrik wajah, seperti sektor administrasi publik dan layanan keuangan.

Negara-negara yang telah menerapkan prosedur pembuatan

paspor secara daring dengan fitur unggah foto paspor secara mandiri, seperti Amerika Serikat dan negara-negara anggota Uni Eropa, memiliki tantangan tersendiri. Terlebih lagi negara-negara Uni Eropa yang menerapkan kebijakan perbatasan terbuka antarnegara anggota dan memungkinkan pelintas menggunakan *autogate*. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh kriminal yang menjadi buronan atau orang asing yang tidak memenuhi syarat untuk memasuki wilayah Uni Eropa tanpa terdeteksi.

Sebelumnya, Frontex (Badan Penjaga Perbatasan dan Pantai Eropa) juga menyelenggarakan International Conference on Biometrics for Borders: Morphing and Morphing Attack Detection Methods pada 9–10 Oktober 2019 di Warsawa, Polandia. Sama halnya dengan ICAO, Frontex pada konferensi internasional ini juga secara spesifik membahas ancaman *face morph* dan upaya penanggulangannya.

Mitigasi Risiko Face Morph

Mencegah ancaman *face morph* memerlukan kombinasi solusi teknologi yang selaras dengan praktik terbaik yang dimiliki oleh industri *face recognition*. Pencegahan terjadinya risiko *face morph* dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi *face morph detection* pada *autogate* yang digunakan sebagai lapisan keamanan tambahan.

Teknologi ini menggunakan metode *differential image-based morphing attack detection*. Metode ini melakukan perbandingan antara foto yang terdapat pada paspor dengan foto ataupun video yang diambil langsung di TPI. Apabila hasilnya dicurigai sebagai *face morph*, verifikasi lanjutan akan dilakukan.

Autentikasi dokumen perjalanan juga perlu dilakukan melalui *Public Key Directory* (PKD) ICAO, yang merupakan pusat data untuk pertukaran informasi

negara-negara yang tergabung di dalamnya. Autentikasi dan integrasi paspor elektronik berperan penting sebagai proses validasi dokumen identitas utama yang digunakan dalam perjalanan internasional.

Upaya pencegahan risiko *face morph* tidak hanya tentang aspek teknologi berupa algoritma beserta variasi dan jumlah *dataset training model* yang makin meningkat. ICAO dan Frontex juga kembali menerapkan beberapa prosedur praktik terbaik untuk mencegah ancaman *face morph*, yaitu *live enrollment*. *Live enrollment* merupakan pemotretan dan pengambilan biometrik langsung kepada pemohon paspor. Metode ini disertai dengan verifikasi dokumen-dokumen identitas resmi, seperti yang telah kembali dilakukan Norwegia, Swedia, dan Jerman.

Meski begitu, kebijakan tersebut dianggap sebagai kemunduran teknologi bagi sebagian negara di tengah tren serta kebutuhan masyarakat akan transformasi digital berbasis layanan mandiri yang makin meningkat. Alternatif lain berupa *self-service kiosk* yang tersebar di berbagai penjurur negara untuk mengambil biometrik foto wajah pemohon paspor secara mandiri, yang telah diterapkan di Finlandia, Prancis, dan Inggris.

Ancaman bagi Indonesia

Risiko *face morph* pada dasarnya belum berpotensi terjadi pada prosedur permohonan paspor di Indonesia. Sebab, proses layanan pembuatan paspor di Indonesia saat ini masih mewajibkan pemohon untuk datang langsung ke kantor imigrasi untuk melakukan proses pengambilan foto paspor yang dilakukan secara langsung oleh petugas imigrasi. Meski demikian, ancaman tersebut tetap dapat terjadi pada keimigrasian Indonesia yang telah mengimplementasikan teknologi *face recognition* melalui *autogate* yang dipasang di sejumlah TPI utama.

Diperlukan kerja sama antara Indonesia dengan negara-negara ataupun organisasi internasional lainnya untuk melakukan sinergi dan koordinasi terkait penanganan kasus *face morph*. Pertukaran data, penerapan algoritma *face morph detection*, serta *benchmark of best practice* juga diperlukan dalam hal peningkatan teknologi deteksi terhadap ancaman *face morph* yang mungkin terjadi. ■

**MENCEGAH ANCAMAN
FACE MORPH MEMERLUKAN
KOMBINASI SOLUSI
TEKNOLOGI YANG SELARAS
DENGAN PRAKTIK
TERBAIK YANG DIMILIKI
OLEH INDUSTRI FACE
RECOGNITION.**



Lepaskan FOMO, Rangkul JOMO: **TEMUKAN KEDAMAIAN DALAM KETIDAKHADIRAN**

Meskipun terlihat seru, mengejar pemenuhan FOMO (*fear of missing out*) menghadirkan kesenangan yang semu. Sebagai gantinya, JOMO (*joy of missing out*) memberikan tawaran yang menyegarkan di tengah dunia yang hiruk pikuk dan penuh tuntutan.

■ Penulis: Suprianto Haseng, penulis di *Good News From Indonesia*

Pada zaman digital yang serbacepat ini, banyak dari kita terjebak dalam perangkap FOMO (*fear of missing out*), yaitu perasaan takut akan ketinggalan tren yang sedang terjadi di masyarakat. Setiap notifikasi dan unggahan di media sosial seolah mengingatkan kita bahwa ada banyak hal menakjubkan di luar sana yang menuntut perhatian kita. Lalu jika memenuhi perasaan FOMO tersebut, kita seolah akan merasakan kebahagiaan. Namun, di balik semua itu, ada kebenaran pahit dari FOMO. FOMO sebenarnya membunuh kebahagiaan kita.

Bagaimana jika kebahagiaan sejati dapat ditemukan dalam kesederhanaan dan jauh dari tekanan untuk selalu terhubung? Ada satu jalan untuk keluar dari pusaran FOMO. Itulah dunia JOMO (*joy of missing out*)—ruang untuk belajar merayakan momen-momen kecil, menemukan kedamaian dalam ketidakhadiran, dan akhirnya mendapatkan surga dalam kehidupan yang lebih sederhana.

Filosofi JOMO mengajak kita untuk menikmati momen dan menghargai hal-hal sederhana tanpa tekanan untuk mengikuti tren. Kebahagiaan tidak lagi diukur dari validasi sosial, tetapi ketenangan batin dan rasa syukur atas apa yang kita miliki.

Keluar dari Pergulatan FOMO

FOMO dapat memengaruhi kesehatan mental. Menurut Patrick McGinnis dalam bukunya *FOMO: Fear of Missing Out*, orang yang mengalami FOMO sering kali memiliki rasa percaya diri yang rendah, merasa kesepian, dan sering membandingkan diri sendiri dengan kesuksesan orang lain.

Di dunia yang berisik dan penuh tuntutan, JOMO menjadi tawaran oase yang menyegarkan. Melangkah keluar

dari kungkungan perasaan FOMO dan fokus pada kebahagiaan diri adalah langkah penting untuk menjaga kesehatan mental kita.

Dalam buku *Business Drivers in Promoting Digital Detoxification*, Simon Grima dkk. menyebutkan bahwa beralih dari FOMO ke JOMO dapat berdampak positif dalam berbagai aspek kehidupan sosial.

Salah satu langkah pertama yang dapat diambil adalah membatasi waktu berselancar di media sosial. Dengan mengurangi penggunaan media sosial, kita bisa menghindari perbandingan yang tidak sehat dan lebih fokus pada kehidupan nyata. Ini akan membuat kita lebih terhubung dengan diri sendiri dan menjalin hubungan yang lebih bermakna dengan orang-orang di sekitar kita.

Penting juga untuk belajar berkata “tidak” terhadap hal-hal yang tidak mendukung kebahagiaan kita. Terjebak dalam rutinitas yang tidak memberikan nilai positif dan hanya memenuhi ekspektasi orang lain bisa sangat menguras energi.

Memilih kegiatan yang bermakna dan memberi nilai lebih pada setiap momen akan membuat hidup terasa lebih memuaskan. Hal ini akan memungkinkan kita untuk mengarahkan energi ke hal-hal yang benar-benar penting.

Merayakan Momen-Momen Kecil

Di tengah kesibukan yang sering menguras energi, luangkanlah waktu untuk menikmati momen-momen kecil yang sering terabaikan. Cobalah menyelami dunia buku yang penuh petualangan, berjalan santai di alam, atau sekadar menikmati secangkir kopi hangat bersama pasangan. Momen-momen kecil ini bukan hanya untuk menghabiskan waktu, melainkan juga merasakan kebahagiaan sejati dan menemukan kedamaian dalam diri.

Ini adalah inti dari JOMO: kebahagiaan dalam ketidakhadiran. Dengan merayakan momen-momen kecil, kita melepaskan tekanan untuk selalu mengejar sesuatu yang lebih. Bersyukur atas hal-hal kecil ini memungkinkan kita melihat keindahan hidup yang sering terlewatkan.

Jadi, mari kita ambil napas dalam-dalam, lakukan relaksasi, dan nikmati setiap momen, yang jauh dari tuntutan dunia luar. Dalam kesederhanaan dan semangat JOMO, kebahagiaan sejati menanti kita.

Kekuatan Rasa Syukur

Rasa syukur adalah bekal untuk meningkatkan kepuasan dan kebahagiaan dalam hidup. Penelitian menunjukkan bahwa praktik bersyukur dapat meningkatkan kesejahteraan emosional dan mengurangi gejala kecemasan dan depresi. Bersyukur menjadi salah satu cara untuk menerapkan prinsip JOMO.

Dengan bersyukur, kita dapat menemukan kebahagiaan yang lebih autentik. Ini bukan hanya tentang menikmati momen yang kita miliki, melainkan juga melepaskan beban mental akibat kecemasan untuk selalu terhubung dengan dunia luar.

JOMO mengajarkan kita bahwa tidak apa-apa untuk tidak mengikuti setiap tren atau aktivitas yang sedang populer. Kebahagiaan sejati sering kali ditemukan dalam kesederhanaan dan keheningan.

Mengubah Pola Pikir

Walau begitu, transisi mental dari FOMO ke JOMO bukanlah proses yang mudah. Banyak dari kita sudah merasa terikat dengan media sosial dan aktivitas yang menjanjikan kepuasan instan. Mengubah pola pikir ini memerlukan kesadaran diri dan komitmen untuk membuat pilihan

**FILOSOFI JOMO
MENGAJAK KITA
UNTUK MENIKMATI
MOMEN DAN
MENGHARGAI HAL-
HAL SEDERHANA
TANPA TEKANAN
UNTUK MENGIKUTI
TREN.**

Eksresi seseorang yang
merasakan FOMO (ilustrasi)
(Sumber: freepik.com)

yang lebih baik. Ini memang perjalanan yang membutuhkan waktu dan usaha, tetapi hasil yang akan kita dapatkan adalah sebuah kehidupan yang lebih memuaskan dan berharga.

Di dunia yang makin terhubung ini, kita juga perlu menemukan cara untuk

terhubung dengan diri sendiri dan menghargai momen-momen sederhana. Dengan merangkul JOMO, kita tidak hanya memperbaiki kualitas hidup, tetapi juga menciptakan ruang untuk pertumbuhan pribadi yang lebih baik.

Jadi, mari kita peluk kebahagiaan

yang datang dari ketenangan batin dan rasa syukur. Saatnya kita meninggalkan FOMO dan merangkul JOMO. Sebab, hidup ini terlalu berharga untuk dilewatkan hanya karena ketakutan akan ketertinggalan. ■

Pulau Morotai:

KEINDAHAN YANG MENYIMPAN SEJARAH

Pernahkah kamu berkunjung ke Pulau Morotai, Maluku Utara? Pulau Tiga Matahari ini menawarkan pengalaman wisata sejarah, alam, hingga kuliner yang tak terlupakan.

■ Penulis: Sam Fernando

Morotai adalah destinasi pariwisata di bagian utara Indonesia, tepatnya di Provinsi Maluku Utara. Berada di ujung utara Kepulauan Rempah-Rempah, Morotai menyimpan berbagai macam cerita menarik. Untuk menuju Morotai, wisatawan

bisa menggunakan penerbangan Wings Air yang beroperasi setiap hari dari Bandara Sultan Babullah di Kota Ternate ke Bandara Pitu di Morotai.

Dengan luas sekitar 2.337 km² dan panjang garis pantai 311.217 km, Morotai memiliki 33 pulau kecil, dengan hanya 7 pulau di antaranya yang

berpenghuni. Daruba menjadi daratan terbesar di kepulauan ini.

Sebelum Perang Pasifik pecah, Morotai berpenghuni 9.000 penduduk serta belum dikembangkan secara komersial. Pulau ini merupakan bagian dari Hindia Belanda dan diperintah oleh Belanda melalui Kesultanan Ternate.

(Sumber: dolanesia.travel)



Pada awal 1942, Jepang menduduki Morotai selama kampanye Hindia Belanda, tetapi tidak menempatkan pasukannya di sana ataupun mengembangkannya.

Saksikan Peninggalan Bersejarah

Morotai memiliki posisi geopolitik yang sangat strategis pada Perang Dunia II. Panglima Divisi VII Amerika Serikat (AS) Jenderal Douglas MacArthur menjadikannya basis untuk merebut Filipina dari kekuasaan Jepang.

Pasukan AS membangun pangkalan militer laut dan udara di dekat Daruba, ibu kota Kabupaten Morotai. Sisi selatan pantai ini pun dijadikan pangkalan angkatan laut mereka. Hingga saat ini, area itu masih dikenal warga dengan nama Navy Base yang kini digunakan sebagai pelabuhan feri. Peninggalan perang di Morotai seakan menjadi saksi sejarah bahwa Perang Dunia II menggunakan

kekuatan tempur yang sangat masif.

Di Pulau Zum-Zum, pulau kecil berjarak 10 menit perjalanan dengan perahu ke arah barat Daruba, patung Jenderal Douglas MacArthur berdiri dengan gagahnya. Kabarnya, sang Jenderal kerap menyambangi pulau ini pada masa Perang Dunia II. Sayangnya, kondisi monumen tersebut sudah tidak terawat dan dipenuhi rumput ilalang.

Selain pangkalan militer dan patung, ada Museum Swadaya Perang Dunia II yang didirikan pada 2012. Museum ini berisi memorabilia Perang Dunia II yang dikoleksi oleh masyarakat. Barang-barang yang dipamerkan dikumpulkan dan dicatat oleh Bapak Muhlis Eso sejak berusia 10 tahun.

Pak Muhlis mendapatkan barang-barang bersejarah peninggalan tentara Sekutu dengan melakukan pencarian di lahan milik keluarganya yang seluas tiga hektare. Kini, ia ingin membuat area perkemahan, tempat pengunjung bisa ikut mencari barang peninggalan perang, mencatat penemuannya tersebut, menulis perasaan, lalu menyimpannya di Museum Swadaya Perang Dunia II. Nama penemu, waktu, dan titik lokasi penemuannya pun akan dicatat.

Jelajahi Keindahan Lautan

Morotai juga dikenal dengan julukan Pulau Tiga Matahari karena iklimnya yang panas. Meskipun begitu, Morotai memiliki banyak daya tarik wisata alam yang menarik untuk dijelajahi.

Salah satu ikon wisata alam yang paling terkenal di Morotai adalah Pulau Dodola. Pulau ini terdiri atas dua bagian, Dodola Kecil dan Dodola Besar. Keunikan pulau ini terletak pada jembatan pasir sepanjang 500 meter yang menghubungkan kedua pulau saat air laut surut. Berjalan melintasi jembatan pasir ini, dengan pemandangan air laut biru toska yang jernih dan terumbu karang yang terlihat jelas di kedua sisi, adalah pengalaman yang sangat istimewa.

Morotai juga terkenal dengan keindahan bawah laut yang menakjubkan. Dengan lebih dari 28 titik menyelam yang beragam, Morotai menawarkan pengalaman tak terlupakan bagi para pencinta *diving*. Salah satu spot menyelam populernya adalah Matita Shark Point yang merupakan "rumah" bagi hiu-hiu karang. Di sini, para penyelam dapat menyelam di kedalaman sekitar 20 meter dan menyaksikan puluhan hiu karang berenang di sekitar mereka.



Patung Jenderal Douglas MacArthur di Pulau Zum-Zum (Sumber: tripadvisor.com)

Selain Matita Shark Point, Morotai memiliki spot menyelam bersejarah yang disebut Wawama Wreck Dive Point. Di spot ini, para penyelam dapat melihat peninggalan sejarah Perang Dunia II yang berada di bawah laut.

Namun, hanya penyelam berpengalaman dengan lisensi minimal *advanced* yang dapat menyelam di sini karena kedalamannya mencapai 30–50 meter.

Lengkapi dengan Kuliner Lezat

Setelah menjelajahi keindahan alam Morotai, jangan lupa untuk mencicipi kuliner khasnya yang lezat. Beberapa hidangan yang patut dicoba adalah nasi jaha yang terbuat dari campuran beras, santan kelapa, dan bumbu yang dibakar dan dibalut dengan daun; papeda yang nikmat disantap bersama tangkapan laut segar; dan gohu ikan, hidangan pedas dari ikan yang dibumbui dengan garam, tumisan bawang, dan cabai. Untuk camilan, wisatawan dapat mencoba kue bagea, wajik, halua kacang, roti panggang kenari, dan pisang goreng khas Morotai yang menggugah selera.

Pulau Morotai adalah destinasi wisata sempurna bagi siapa saja yang mencari pengalaman unik dan tak terlupakan. Dengan keindahan alamnya yang memukau, kelezatan kulinernya yang menggoda, dan sejarahnya yang kaya, Morotai menawarkan kenangan yang istimewa bagi setiap pengunjung. ■

Penerapan Paspor Elektronik 100% di Seluruh Indonesia



Keunggulan Paspor Elektronik



Cip terenskripsi

Paspor lebih sulit dipalsukan dengan penggunaan cip untuk menyimpan data biometrik pemegang paspor.



Keamanan lebih tinggi

Tingkat keamanan lebih tinggi karena menggunakan teknologi terbaru.



Mudah menggunakan autogate

Proses pemeriksaan imigrasi melalui autogate menjadi lebih cepat dan efisien.



Bebas visa di beberapa negara

Pemegang paspor elektronik mendapatkan fasilitas bebas visa di beberapa negara.



Mendukung standarisasi internasional

Paspor elektronik telah memenuhi standar ICAO (International Civil Aviation Organization).



Durabilitas yang lebih baik

E-paspor lembar polikarbonat menggunakan material yang lebih kuat dan teknologi yang lebih canggih.

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberlakukan penerbitan e-paspor 100% secara bertahap di seluruh Indonesia. Penerapan e-paspor 100% tahap pertama dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2024 pada Kantor Imigrasi Semarang dan tanggal 1 November 2024 pada Kantor Imigrasi Jakarta Pusat, kemudian dilanjutkan ke kantor imigrasi lainnya di seluruh Indonesia secara bertahap per regional Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi dengan jadwal sebagai berikut:



Tahap 8

1 Juli 2025

1. Kalimantan Timur
2. Kalimantan Selatan

Tahap 10

1 Oktober 2025

1. Maluku
2. Maluku Utara
3. Sulawesi Barat
4. Sulawesi Utara
5. Sulawesi Tengah
6. Sulawesi Tenggara
7. Sulawesi Selatan
8. Gorontalo

Tahap 9

1 September 2025

1. Bali
2. Nusa Tenggara Barat
3. Nusa Tenggara Timur

Tahap 10

1 November 2025

1. Papua
2. Papua Barat

Tarif PNBP Paspor

- Paspor elektronik masa berlaku 5 tahun Rp650.000
- Paspor elektronik masa berlaku 10 tahun Rp950.000
- Layanan percepatan paspor selesai pada hari yang sama* Rp1.000.000
- Paspor hilang* Rp1.000.000
- Paspor rusak* Rp500.000

*di luar biaya permohonan paspor



Hangat dan Bersahaja: **HARI BHAKTI IMIGRASI KE-75 DI DEN HAAG, BEIJING, DAN TAIPEI**

Tidak hanya di tanah air, perwakilan Indonesia di berbagai negara pun turut merayakan Hari Bhakti Imigrasi ke-75. Perayaan ini menjadi perayaan pertama di bawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia.

■ Penulis: Yolanda Rosylvia Juniar



Pemberian suvenir dalam rangka Hari Bhakti Imigrasi ke-75 oleh Atase Imigrasi Den Haag Oeray Ghufroon Maryudha (Foto: Dok. KBRI Den Haag)

Perayaan Hari Bhakti Imigrasi ke-75 terasa begitu istimewa. Tidak hanya diselenggarakan di tanah air, perwakilan Indonesia di berbagai negara, seperti Den Haag, Beijing, dan Taipei, juga tidak ketinggalan menyemarakkan rangkaian peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke-75.

Tahun ini, tepatnya pada 26 Januari, untuk pertama kalinya Hari Bhakti Imigrasi dirayakan di bawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia (RI) setelah 74 tahun menjadi bagian dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Perayaan ini pun menjadi momentum bersejarah.

Mengusung tema “Melayani, Mengabdikan, dan Berinovasi”, peringatan tahun ini mengambil pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain mempererat solidaritas internal, perayaan Hari Bhakti Imigrasi ke-75 ini juga difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang melibatkan serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan semangat Imigrasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan kontribusi positif bagi bangsa.

Layanan Spesial di KBRI Den Haag
KBRI Den Haag, Belanda memperingati Hari Bhakti Imigrasi ke-75 dengan acara syukuran sederhana pada 31 Januari 2025. Acara ini dihadiri oleh Duta Besar RI dan Wakil Kepala Perwakilan RI beserta staf KBRI Den Haag.

Tidak hanya syukuran, sebagai bentuk apresiasi dan rasa syukur,



Pemotongan tumpeng dalam rangka syukuran Hari Bhakti Imigrasi ke-75 oleh Dubes RI untuk Kerajaan Belanda (Foto: Dok. KBRI Den Haag)

KBRI Den Haag memberikan layanan makan siang gratis dan membagikan souvenir kepada para pemohon paspor dan visa pada 3 Februari 2025. Layanan ini mendapatkan respons positif dari warga negara Indonesia (WNI) yang hadir.

"Pelayanannya sangat cepat dan stafnya sangat ramah. Dari *front desk* hingga bagian belakang, semua ramah. Rasanya seperti di Indonesia, seperti di rumah sendiri," ungkap salah satu masyarakat yang hadir. Masyarakat Indonesia berharap agar KBRI Den Haag terus menjaga kualitas pelayanan yang sudah baik.

Atase Imigrasi KBRI Den Haag Oeray Gufran Maryudha menyatakan optimismenya bahwa dengan semangat dan kerja keras, momentum peringatan Hari Bhakti Imigrasi ini akan menjadi titik awal bagi Imigrasi untuk terus memberikan pelayanan terbaik. "Kami akan terus berinovasi, melayani, dan mengabdikan kepada bangsa dan negara, serta berkomitmen untuk mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045," ujar Oeray.

Makanan Bergizi Gratis di KBRI Beijing
Sejalan dengan KBRI Den Haag, mengusung konsep kesederhanaan yang tetap berdampak langsung kepada masyarakat, KBRI Beijing memiliki kiat tersendiri dalam memperingati Hari Bhakti Imigrasi ke-75. Dengan memanfaatkan sumber dana dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang ada, KBRI Beijing memberikan makanan bergizi secara gratis kepada sekitar 50 mahasiswa

Indonesia yang berada di Tiongkok.

"Sebagian besar WNI di Tiongkok adalah mahasiswa, baik itu S-1, S-2, maupun S-3. Untuk itu, kami ingin memperingati Hari Bhakti Imigrasi dengan memberikan makanan bergizi secara gratis kepada mereka," ujar Atase Imigrasi KBRI Beijing Herawan Sukoaji.

Makanan bergizi yang diberikan mencakup nasi; lauk-pauk, seperti ikan atau daging; sayuran; telur; dan minuman. Kegiatan ini berlangsung selama beberapa hari dan mendapatkan banyak respons positif dari masyarakat terutama para mahasiswa Indonesia. Selain itu, KBRI Beijing juga memberikan layanan Paspor Simpatik pada Sabtu, 25 Januari 2025.

Herawan menyatakan bahwa pada usia ke-75 ini, Imigrasi Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan, terutama dengan bergabungnya Imigrasi ke Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Herawan berharap semua sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan fasilitas yang ada dapat dimaksimalkan demi kebaikan bangsa dan negara.

Semangat Hari Bhakti Imigrasi di KDEI Taipei

Peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke-75 di Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei, Taiwan tidak hanya dirayakan dengan syukuran sederhana yang diawali pemotongan tumpeng, tetapi juga semangat baru. Kepala KDEI Taipei Arif Sulisty dan Kepala Bidang Pariwisata KDEI

Taipei Ichwan Joesoef turut hadir dan memberikan apresiasi terhadap kegiatan ini.

Pada 19 Januari 2025, KDEI Taipei menggelar layanan paspor Sunday Service yang khusus diadakan untuk memenuhi kebutuhan pemohon paspor baru maupun penggantian paspor habis masa berlaku. Untuk menyemarakkan acara, selama Sunday Service berlangsung, KDEI Taipei juga membagikan makanan gratis dan menghadirkan kuis keimigrasian untuk mempererat kebersamaan di antara masyarakat Indonesia di Taipei.

"Ini adalah momentum penting bagi KDEI Taipei untuk menyelenggarakan kegiatan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat, sekaligus kesempatan bagi WNI yang ada di sini untuk berkumpul bersama sesama WNI," ujar Wahyu Wibisono, Kepala Bidang Imigrasi KDEI Taipei.

Meski sederhana, semarak Hari Bhakti Imigrasi ini mampu menghadirkan semangat dan keceriaan. Masyarakat yang hadir pun memperoleh wawasan yang lebih luas mengenai dunia keimigrasian.

Atase Imigrasi KDEI Taipei berharap, pada usia ke-75 ini, Imigrasi dapat makin mengedepankan profesionalisme dan mampu berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. "Semoga Imigrasi KDEI Taipei terus menjadi garda terdepan dalam melindungi dan melayani WNI di Taiwan dengan dedikasi tinggi serta makin memperkuat sinergi untuk menciptakan layanan yang cepat, transparan, dan akuntabel," ujar Wahyu. ■

Kepala Bidang Imigrasi KDEI Taipei Wahyu Wibisono menyapa pemohon Sunday Service Layanan Keimigrasian dalam rangka Hari Bhakti Imigrasi ke-75. (Foto: Dok. KDEI Taipei)





Judul Buku : **Who Are You?: Saatnya Menguak dan Memahami Pikiran Bawah Sadarmu**
 Penulis : Jung Wooyul
 Penerbit : Gramedia Pustaka Utama
 Tahun Terbit : Januari 2022 (cetakan kedua)
 Halaman : 228 halaman

PAHAMI DIRI SENDIRI DENGAN HAL-HAL SEDERHANA BERSAMA WHO ARE YOU?

Kepribadian seseorang dapat terbaca dari pilihannya terhadap hal-hal dalam keseharian. Tiga tipe kepribadian dari Jung Wooyul dapat membantu pembaca meningkatkan pemahaman terhadap diri sendiri maupun orang lain.

■ Penulis: Fipit Fatimah, Bima Ahmad

Buku **Who Are You?: Saatnya Menguak dan Memahami Pikiran Bawah Sadarmu** karya Jung Wooyul ini termasuk dalam kategori *self-improvement* yang dikemas dengan menarik. Jung Wooyul sendiri merupakan seorang psikiater. Ia juga anggota Asosiasi Kesehatan Mental Anak dan Remaja Korea serta Asosiasi Konsultasi Suami-Istri. Buku karyanya ini dapat membantu pembaca menemukan jati diri melalui hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari.

Memahami diri sendiri merupakan hal yang penting, tetapi terkadang menjadi proses yang sulit. Jung Wooyul berusaha untuk membuat pemahaman atas tipe kepribadian orang menjadi lebih sederhana melalui pilihan-pilihan yang diambil dalam keseharian.

Kenali Diri dari Selera Kopi

Tipe kepribadian dari Jung Wooyul terbagi menjadi tiga bagian besar, yaitu psikologi benda, psikologi gawai, dan psikologi hubungan. Ia memberikan contoh pilihan seseorang terhadap *caffè latte* (kopi susu), yang menggambarkan sosok yang mencari dan memikirkan kenyamanan, memiliki kepolosan seperti anak kecil, dan sering merasa bimbang tetapi pada dasarnya ramah.

Penyuka kapucino digambarkan sebagai orang yang suka mengobrol

dan memiliki hati yang hangat. Penyuka jenis kopi ini lebih mementingkan detail dibandingkan gambaran secara keseluruhan dan bekerja dengan sangat teliti. Ia juga kreatif, artistik, dan tidak suka terbawa tren. Sementara itu, penyuka amerikano digambarkan sebagai orang yang menghargai sopan santun dan lebih menyukai kestabilan daripada konflik dan perubahan. Ia juga sering berpenampilan rapi, bersikap pendiam, dan bertindak hati-hati.

Contoh lainnya adalah pilihan orang dalam membuat alamat surel (*e-mail*). Bila menggunakan angka, pemilik surel tersebut cenderung melakukan yang terbaik dengan mengendalikan semuanya. Ia merupakan seorang introver yang pasif, kurang inisiatif, dan kurang berpikir kritis. Sementara itu, orang yang tidak menggunakan angka dalam alamat surelnya digambarkan ingin menunjukkan identitas diri, ramah, aktif, dan ceria.

(+) Kelebihan Buku

Buku ini sangat menarik bagi pembaca yang ingin memahami kepribadian dirinya atau orang lain melalui hal-hal sederhana. Dengan begitu,

buku ini dapat membantu pembaca meningkatkan pemahaman untuk memaksimalkan potensi diri atau hubungannya dengan orang lain.

Dengan dikemas dalam bahasa yang mudah dimengerti, buku ini menjadi pilihan yang pas bagi pembaca yang ingin memahami psikologi secara sederhana. Selain itu, hampir seluruh halaman dihiasi ilustrasi dengan tema yang berbeda-beda sesuai dengan topik yang diangkat sehingga memperkuat pembahasan.

(-) Kekurangan Buku

Penjelasan dalam buku ini terkadang membuat kita tersenyum untuk membenarkan kesesuaian-kesesuaian dengan tipe kepribadian yang dibahas. Namun, beberapa argumen penulis terkadang terasa bertentangan dengan teori kepribadian yang sudah dijelaskan dalam halaman-halaman sebelumnya.

Secara keseluruhan, buku ini sangat direkomendasikan bagi pembaca yang ingin memahami diri sendiri dan orang lain. Dengan meningkatnya pemahaman tersebut, kemampuan bersosialisasi pun dapat menjadi lebih baik. ■

MEMAHAMI DIRI SENDIRI MERUPAKAN HAL YANG PENTING, TETAPI TERKADANG MENJADI PROSES YANG SULIT.



Antrean pemeriksaan keimigrasian pada momen Idulfitri tahun 2024 di PLBN Wini, Nusa Tenggara Timur (Foto: Dok. Kanim Atambua)



Para penumpang menggunakan autogate baru di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali (Foto: Arif Rahman Suryaman)



Seorang anak berfoto dengan petugas imigrasi setelah melewati autogate di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. (Foto: Habil Ashari)



Suasana pelayanan paspor di ekshibisi yang selalu ramai pengunjung (Foto: Arif Rahman Suryaman)



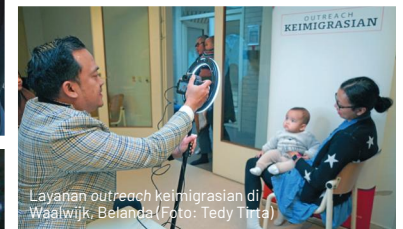
Mang Gajang tampak sedang menjalankan tugasnya sebagai Polsus Imigrasi. (Foto: Dok. Seksi Tikim Kanim Kelas II TPI Entikong)



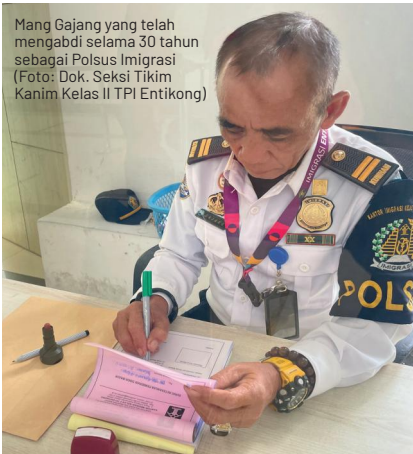
Layanan izin tinggal Kumham Bergerak, Imigrasi Menyapa di Gili Trawangan, Nusa Tenggara Barat (Foto: Dok. Kanim Mataram)



Suasana autogate di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Foto: Jimmy Asmoro)



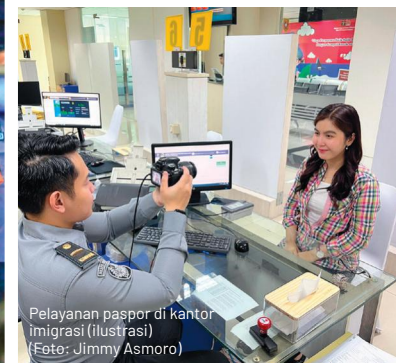
Layanan outreach keimigrasian di Waalwijk, Belanda (Foto: Tedy Triji)



Mang Gajang yang telah mengabdikan selama 30 tahun sebagai Polsus Imigrasi (Foto: Dok. Seksi Tikim Kanim Kelas II TPI Entikong)



Penangkapan buron WN Jepang terduga korupsi dana bansos Covid-19 (Foto: Arif Rahman Suryaman)



Pelayanan paspor di kantor imigrasi (ilustrasi) (Foto: Jimmy Asmoro)

TARIF PASPOR ANAK NAIK?





Layanan Urus Paspor Kolektif

di Kantor, Kampus, Komunitas, atau Kompleks Perumahan Kamu

Informasi lebih lanjut, kunjungi kantor imigrasi terdekat



Direktorat Jenderal Imigrasi mengucapkan



Marhaban Ya

1446 H / 2025 M

Ramadan

Selamat Menunaikan Ibadah Puasa